

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN
LINGKUNGAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

RARAS HALIDA RAHMI

NIM. 12030110120048

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Raras Halida Rahmi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120048
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN**
Dosen Pembimbing : Prof. Drs. H. Arifin, M.Com., Hons., Ph.D., Akt

Semarang, 10 Februari 2014

Dosen Pembimbing,

Prof. Drs. H. Arifin, M.Com., Hons., Ph.D., Akt

NIP. 196 00909 198 703 1023

FEB UNDIP

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Raras Halida Rahmi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120048
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 5 Maret 2014

Tim Penguji:

1. Prof. Drs. H. Arifin, M.Com., Hons., Ph.D., Akt. (.....)
2. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, M.Acc., Akt. (.....)
3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Raras Halida Rahmi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Pengungkapan Lingkungan**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,

Raras Halida Rahmi

NIM. 12030110120048

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of corporate governance structure on environmental disclosure of a firm. To measure the corporate governance structure consisting of 5 proxy there are independent board is using the proportion of independent board, institutional ownership is using the percentage of institutional investors, board size is using the total number of commissioners, the proportion of women directors is using the ratio of the number of women directors to the total number of directors and sizes audit committee using the total number of audit committee members in the firm, while to measure the amount of environmental disclosure using the GRI disclosure items. This study also used several control variables are firm size as measured by total assets and operating revenues, profitability is measured using ROA and the type of industry that is measured using a dummy variable.

The population in this study consists of all the entire company incorporated in NCSR in year 2009, 2010, 2011 and 2012. The sampling method used in this study is purposive sampling. By doing sampling and processing data, the final amounts of the sample are 60 samples from 15 firms in one year. This study uses linear regression as an analysis technique to examine the hypotheses.

The analysis showed that both institutional ownership and audit committee size have significant positive influence on environmental disclosure. While the proportion of independent board of commissioner, board size and proportion of women director did not significantly affect environmental disclosure. From these results it can be concluded that the structure of corporate governance positive influence on the environmental disclosures.

Keyword: corporate governance structure, environmental disclosure, sustainability report, GRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan. Untuk mengukur struktur *corporate governance* yang terdiri dari 5 proksi yaitu dewan komisaris independen menggunakan proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional menggunakan presentase investor institusional, ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah total dewan komisaris, proporsi direksi wanita menggunakan perbandingan jumlah direksi wanita dengan total jumlah direksi dan ukuran komite audit menggunakan jumlah total anggota komite audit dalam perusahaan, sedangkan untuk mengukur pengungkapan lingkungan menggunakan jumlah item pengungkapan dalam GRI. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan yang diukur menggunakan total aset dan pendapatan operasi, profitabilitas yang diukur menggunakan ROA serta jenis industri yang diukur menggunakan variabel dummy.

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang tergabung dalam NCSR tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Setelah melalui tahap *sampling* dan pengolahan data, didapatkan sampel akhir yang layak diobservasi yaitu 60 sampel yang terdiri dari 15 perusahaan tiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear untuk menguji hipotesis penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa baik kepemilikan institusional dan ukuran komite audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Sedangkan dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris serta proporsi direksi wanita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur *corporate governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Kata kunci: struktur *corporate governance*, pengungkapan lingkungan, laporan berkelanjutan, GRI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS Al Insyirah: 5)

“A goal without a plan is just a dream”

“Never stop learning because life never stops teaching”

“Don’t give up because of something someone said. Use that as motivation to push harder”

“Never give up on something you really want. It is difficult to wait but worse to regret”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Papa, Mama, serta Kakak Adikku tersayang

Keluarga besar Papa dan Mama yang baik hati

Sahabat-sahabat tercinta

Keluarga besar R1 Akuntansi 2010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Lingkungan” dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Drs. H. Arifin, M.Com., Hons., Ph.D., Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.
3. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan dosen pembimbing lanjutan.
4. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali.

5. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Ekonomika dan Bisnis atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Orang tua tercinta, Papa Amin Nugroho dan Mama Niniek Sumartini, kakakku Anindita Almira Luthfi, serta adikku Naufal Adi Nugroho. Terima kasih atas cinta, restu, doa, semangat, dan dukungan yang telah diberikan.
7. Nenekku tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang dan dukungannya.
8. Pakdhe, Budhe, Om serta Tante dari keluarga besar Orang tua tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang, perhatian serta dukungannya.
9. Ahlan Fauzi dan Tito Nur Adityo Nugroho, terima kasih untuk motivasi dan *sharing* selama penyusunan skripsi.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, Kak Nurani, Kak Norma, Kak Watek dan Kak Devi. Terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang telah kalian berikan. Saat-saat bersama kalian menjadi cerita yang tak akan terlupakan.
11. MOSHA. Terima kasih atas memori yang indah selama ini, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.
12. Sahabat semenjak SMA yaitu Raiza, Riri, Rhea, Rona, Ebeth dan Dhila terima kasih untuk kasih sayang, waktu, *support*, dan semangat yang diberikan.

13. Shika Family yaitu Shika, Celad, Arya, Jean, Ani, Gratia, Rezky, Aviv, Kurnia sebagai sahabat serta teman diskusi yang paling baik.
14. Nur Amalia Fitriani, Rezky Eko Prasetyo, Fatimah, Fitri Apriliana, Rizkita Amalinda Hartono, Indu Prasetya sebagai teman satu bimbingan serta teman diskusi yang baik selama ini.
15. Pasangan Akuntansi Undip R1 2010 yaitu Anitya Ardiyani Puspita dan Andi Rachmanda yang telah menjadi teman yang selalu membantu saya selama ini.
16. Keluarga besar Akuntansi Undip R1 2010. Terimakasih atas kebersamaannya selama 4 tahun ini, semoga kita semua sukses dan dapat menjaga silaturahmi sampai kapanpun.
17. Teman-teman KKN Desa Wonokerso, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang yaitu Roy, Lia, Melina, Dewi, Riska, Nalal, Ais, Anang, dan Mas Dedi yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang terkait.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II TELAAH PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Teori Agensi	18
2.1.2 Teori Legitimasi	20
2.2 Pengungkapan Lingkungan	23
2.3 <i>Corporate Governance</i>	27
2.3.1 Pengertian CG	27
2.3.2 Prinsip dasar CG	29
2.3.3 Struktur CG	30
2.3.3.1 Dewan Komisaris Independen	31

2.3.3.2 Kepemilikan Institusional.....	32
2.3.3.3 Ukuran Dewan Komisaris	33
2.3.3.4 Proporsi Direksi Wanita	34
2.3.3.5 Ukuran Komite Audit.....	35
2.4 Penelitian terdahulu	35
2.5 Kerangka Pemikiran	42
2.6 Pengembangan Hipotesis	46
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	54
3.1.1 Variabel Dependen	54
3.1.2 Variabel Independen	55
3.1.3 Variabel Kontrol	58
3.2 Populasi dan Sampel.....	60
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	60
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	61
3.5 Metode Analisis Data.....	62
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	62
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	62
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	62
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas	64
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	64
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	65
3.5.3 Analisis Regresi Linear	66
3.5.4 Uji Hipotesis	67
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	67
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (F test)	68
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parsial (T test)	68
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	69
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	69
4.2 Analisis Data	71
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	71

4.2.2 Uji Asumsi Klasik	74
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	74
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas	76
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas	78
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	80
4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis	81
4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	81
4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F test)	82
4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (T test).....	83
4.3 Pembahasan Hipotesis	90
4.3.1 Hipotesis 1	90
4.3.2 Hipotesis 2	91
4.3.3 Hipotesis 3	92
4.3.4 Hipotesis 4	93
4.3.5 Hipotesis 5	95
4.3.6 Variabel Kontrol	96
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	102
5.3 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4.1 Objek Penelitian	70
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	71
Tabel 4.3 Uji K-S.....	76
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	78
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas	80
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi	81
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi	82
Tabel 4.8 Uji Statistik F	83
Tabel 4.9 Uji Statistik t	84
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	89

FEB UNDIP

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4.1 Normal P-Plot.....	75
Gambar 4.2 Uji Scatterplot.....	79



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Pedoman GRI	108
LAMPIRAN B Data Perusahaan yang menjadi sampel	111
LAMPIRAN C OUTPUT SPSS 20.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan dibahas alasan yang menjadi latar belakang masalah mengenai sebab-sebab dilakukannya penelitian tentang *corporate governance* dihubungkan dengan pengungkapan lingkungan pada perusahaan di Indonesia. Latar belakang tersebut menjadi landasan rumusan penelitian yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang akan diuraikan pada bab ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini, permasalahan lingkungan hidup telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, bahkan saat ini masalah lingkungan hidup telah menjadi isu global dan penting untuk dibicarakan karena menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Pentingnya isu lingkungan hidup tersebut ditandai dengan maraknya pembicaraan dalam agenda politik, ekonomi, dan sosial, khususnya masalah pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas hidup. Berbagai hal yang berkaitan dengan isu lingkungan, dampaknya akan meluas ke bidang yang lainnya. Tanpa adanya kesadaran untuk merawat lingkungan hidup dengan menciptakan suatu koordinasi yang baik antar sesama manusia, kelangsungan lingkungan hidup belum tentu dapat terjaga.

Salah satu isu utama yang mendapat perhatian besar masyarakat dunia adalah pencemaran lingkungan hidup oleh suatu industri. Pengusaha industri

dituntut untuk merubah sistem manajemen lingkungan agar sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pada tahun 1993, ketika heboh kebocoran pipa PT. Inti Indorayon Utama, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmaja segera menyerukan untuk melakukan audit lingkungan atas aktivitas perusahaan ini. Banyak peneliti yang mengungkapkan bagaimana pentingnya suatu organisasi untuk mempertimbangkan pengaruh yang mereka timbulkan terhadap lingkungan dan untuk diungkapkan kepada sejumlah *stakeholder* yang mungkin dipengaruhi (Deegan, 1994), termasuk karyawan, konsumen, komunitas, para pembuat peraturan, media, masyarakat dan pemegang saham (Adams and Zuthsi, 2004).

Pengungkapan mengenai lingkungan secara luas menyediakan informasi yang berhubungan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan (Deegan, 2006). Pelaporan kinerja lingkungan tidak hanya membantu perusahaan untuk memperoleh dukungan *stakeholder* namun juga membantu perusahaan untuk menilai resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan operasi dan untuk mengurangi dampak dari kegiatan operasi perusahaan terhadap lingkungan. Dengan kata lain, perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada para pemegang saham, karyawan, konsumen dan masyarakat sekitar untuk melaporkan segala bentuk kegiatan produksinya yang berhubungan dengan lingkungan ke dalam bentuk sebuah pelaporan lingkungan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi pengungkapan lingkungan sebagai dasar evaluasi.

Berdasarkan banyaknya tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan , maka perusahaan harus menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (*profit*) dengan kinerja sosial (*people*) dan kinerja lingkungan (*planet*) atau disebut *triple bottom-line performance* (Elkington's, 1998). Penyelarasan ketiga kinerja tersebut pada akhirnya akan membuat perusahaan dapat menjalankan operasinya secara legal dalam jangka panjang dan mampu menghasilkan keuntungan yang berlimpah atau keuntungan yang konsisten secara terus menerus.

Di Indonesia yang semula pada awalnya pengungkapan lingkungannya bersifat *voluntary*, saat ini mulai meningkat secara perlahan menjadi pengungkapan lingkungan yang lebih bersifat *mandatory*. Perubahan sifat mengenai pengungkapan lingkungan tersebut dikarenakan oleh semakin lama dirasakan semakin banyak dampak lingkungan yang dihasilkan atas aktivitas dalam kegiatan bisnis perusahaan. Sebagaimana menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 74 undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk menguraikan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Saat ini, sebenarnya undang – undang yang mengatur mengenai wajibnya suatu perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan atas dampak yang dihasilkan dari aktivitas bisnis yang dilaksanakan masih menimbulkan pro kontra. Pada awalnya peraturan tersebut dirasa sangat merugikan bagi perusahaan dan banyak pelaku bisnis yang menolak apabila pengungkapan mengenai lingkungan dijadikan sebagai kewajiban korporasi (*mandatory*) alasannya karena hal itu hanya akan membebani dunia usaha dan membuat banyak perusahaan bangkrut.

Selain itu, juga akan mengganggu iklim usaha dan investasi serta memicu korporasi multinasional enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Deegan (1999) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan adalah hal yang paling penting dalam sebuah organisasi untuk keberadaan jangka panjang dan organisasi harus memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mungkin dapat membahayakan reputasi dan kelangsungan hidup organisasi tersebut.

Di tengah negara yang masih diselimuti budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti Indonesia ini, independensi dari pengungkapan lingkungan yang dilakukan akan dipertanyakan. Perusahaan tersebut berusaha untuk menempuh berbagai cara agar publikasi dari pelaporan lingkungan mendapatkan hasil yang baik demi menghasilkan keuntungan. Ullman (1985) menyatakan ada dua perspektif dalam melakukan kegiatan sosial perusahaan. Pertama, membangun *image* diantara *stakeholder*, menyokong keuntungan dan kepercayaan dari beragam kelompok *stakeholder*. Kedua, kegiatan sosial membawa dampak positif terhadap reputasi perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi dari perspektif strategis. Jika dilaksanakan, praktek pengungkapan lingkungan yang terjadi sekarang ini berindikasi pada praktek *public relation* belaka sehingga terkesan *imagesentris* untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor.

Pentingnya pengungkapan mengenai lingkungan dalam bentuk sebuah pelaporan khusus telah meningkat selama beberapa tahun terakhir dan semakin banyak perusahaan menyadari bahwa pelaporan lingkungan merupakan kegiatan yang sangat penting. Bagi perusahaan, pengungkapan lingkungan dapat

membantu perusahaan untuk mengidentifikasi resiko dan mengetahui cara penghematan biaya. Lebih lanjut, dengan adanya pengungkapan lingkungan maka dapat mengubah tingkat pengembalian keuangan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan meskipun tidak begitu bisa dihitung (Adams dan Zutshi, 2004). Tetapi karena adanya penekanan yang tidak semestinya atas ketaatan dan perundang-undangan yang berlaku, maka banyak perusahaan yang menggunakan pengungkapan lingkungan hanya untuk mengevaluasi dan membuktikan ketaatan. Pandangan seperti ini sangat sempit dan tidak menunjukkan alasan-alasan yang lebih positif untuk melaksanakan pengungkapan tersebut.

Menurut Frimpong dan Owusu (2012), sebuah pengungkapan sosial dan lingkungan memiliki potensi untuk bertindak sebagai alat manajemen risiko yang berguna untuk menilai kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan sosial dan lingkungan. Melalui pengungkapan tersebut, entitas memiliki potensi untuk menghindari risiko penuntutan dan denda akibat pelanggaran potensi hukum lingkungan dan peraturan (www.bcorporation.net). Hal ini terutama berlaku bagi organisasi-organisasi yang terlibat dalam industri yang dapat memberikan dampak pencemaran berbahaya. Selain itu, sebagai perusahaan yang berkelanjutan, para pemangku kepentingan organisasi mungkin memiliki harapan yang tinggi untuk kinerja lingkungan perusahaan (ibid). Fenomena ini mengindikasikan bahwa pengungkapan lingkungan merupakan hal yang penting dalam aktivitas dimana perusahaan tersebut berada.

Faktanya, tidak semua perusahaan melaksanakan kewajiban untuk mengungkapkan mengenai permasalahan lingkungannya dengan benar. Meskipun

pengungkapan lingkungan telah diatur oleh Undang-Undang, debat mengenai "kewajiban" pengungkapan lingkungan masih bergaung. Melalui Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No 1 Paragraf 9, "Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting". PSAK menjadi awal pemicu mengenai pengungkapan atas laporan mengenai lingkungan. Ketika dalam penelitian ini dikaitkan dengan bidang akuntansi, maka seorang akuntan dapat menjadi sosok yang mempunyai peran penting karena adanya akses bagi mereka untuk masuk ke dalam informasi keuangan sebuah perusahaan. Penilaian serta perhitungan yang dilakukan oleh akuntan akan mempermudah manajer dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan serta pelestarian lingkungan. Selain itu, dalam disiplin ilmu akuntansi *dislosure* biaya lingkungan telah lama dirumuskan dan keberadaannya dirasakan semakin penting. Akuntansi mempunyai peranan penting sebagai media pertanggungjawaban publik (*public accountability*) atas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan.

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang secara spesifik dalam lingkup pengungkapan lingkungan yaitu dengan menguji hubungan antara pengungkapan lingkungan dan dengan berbagai indikator dari *corporate governance*. Peningkatan pelaporan lingkungan dapat dicapai dengan *corporate governance* yang kuat, dimana mencakup penyediaan informasi lingkungan kepada *stakeholder* yang sah (Gibson dan O'Donovan, 2007). Perusahaan dengan

struktur *corporate governance* efektif pasti telah menjalankan kewajibannya untuk melaporkan segala sesuatu yang menimbulkan dampak bagi lingkungan atas aktivitas bisnis yang telah dilakukan dan memiliki akses pengalaman yang lebih mudah ke pasar modal. Secara keseluruhan, penelitian ini memprediksi bahwa perusahaan yang beroperasi dalam bidang yang menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar dengan peraturan yang ketat, maka dalam hal *corporate governance*, harus menampilkan kualitas yang lebih tinggi dan nilai yang relevan terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian sebelumnya tentang pengungkapan lingkungan meneliti mengenai pengaruh *good corporate governance* dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan (Pratama, 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya menyangkut *good corporate governance* (GCG) saja namun juga menambahkan variabel independen yaitu kinerja lingkungan untuk melihat pengaruhnya terhadap pengungkapan lingkungan. Dalam penelitian Pratama (2013) menggunakan variabel proksi GCG yaitu proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit. Pengungkapan lingkungan disini diukur dengan menghitung jumlah item yang diungkapkan perusahaan dibagi dengan jumlah item pengungkapan lingkungan GRI.

De Villiers *et al* (2009) meneliti mengenai *Good Corporate Governance* dan kinerja lingkungan perusahaan dengan sampel 100 perusahaan top di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan kinerja lingkungan perusahaan sebagai variabel dependen serta ukuran perusahaan, investor institusional, proporsi

direktur independen dan CEO rangkap sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja lingkungan perusahaan berhubungan positif dengan ukuran perusahaan, berhubungan negatif dengan investor institusional, berhubungan positif dengan proporsi dari direktur independen dan berhubungan negatif dengan CEO rangkap.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kathyayini, Kathy., Carol A. Tilt, Laurence H. Lester, (2012). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel *corporate governance* yang meliputi komisar independen (*board independence*), kepemilikan institusi (*institutional ownership*), ukuran dewan (*board size*) dan proporsi wanita dalam dewan (*proportion of female directors*) dengan sampel 100 perusahaan yang listing pada *Australian Stock Exchange* (ASX) pada tahun 2008.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kathyayini, *et al.* (2012). Perbedaan tersebut yaitu mengenai variabel ukuran dewan komisar (*board size*) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia menerapkan sistem dua tingkat atau *two tier board system* yang memisahkan fungsi direksi dan fungsi pengawasan (dewan komisar), serta terdapat penambahan variabel independen yaitu jumlah komite audit untuk lebih memperkuat penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap *enviromental disclosure*. Selain itu pengambilan sampel penelitian dilakukan di Indonesia dengan berfokus pada perusahaan yang tergabung dalam *National Centre Sustainability Reporting* pada Tahun 2009 -2012. Perusahaan yang tergabung dalam *National Centre Sustainability Reporting* dipilih sebagai sampel karena

perusahaan tersebut belum banyak dijadikan sebagai sampel penelitian, biasanya hanya berfokus pada perusahaan manufaktur dan pertambangan saja. Perusahaan dipilih juga berdasarkan usahanya yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan yang digunakan untuk menjalankan bisnis usahanya dengan menggunakan indikator GRI, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk perusahaan keuangan. Perbankan juga termasuk sampel karena berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 15b). Dengan demikian, pengambilan sampel tersebut dapat terkait dengan penelitian ini yang membahas tentang *environmental disclosure*.

Di Indonesia, kajian tentang pengungkapan lingkungan sudah pernah ditulis pada penelitian terdahulu, kebanyakan hanya menulis tentang keseluruhan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan dan belum fokus pada salah satu elemen yang cukup penting dari CSR tersebut yaitu elemen lingkungan pada suatu perusahaan. Sedangkan *corporate governance* sebagai variabel independen telah banyak digunakan untuk diteliti pengaruhnya terhadap pengungkapan lingkungan, namun belum banyak yang menggunakan proporsi direktur wanita dalam dewan direksi sebagai salah satu bagian dari struktur *corporate governance*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari variabel struktur *corporate governance* ditemukan adanya *research gap* antara penelitian satu dengan yang lain. Untuk itu, dalam penelitian ini mencoba untuk menulis kembali kajian tentang pengaruh dewan komisaris independen, *institutional ownership*, ukuran

dewan komisaris, proporsi wanita dalam dewan direksi dan ukuran komite audit sebagai proksi dari struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan di sebuah perusahaan dengan maksud untuk membuktikan dan menyelesaikan persoalan *research gap* serta mengevaluasi unjuk kerja (*performance*) atau kinerja perusahaan dalam melakukan usaha bisnisnya terhadap lingkungan. Dengan demikian dapat diketahui permasalahan yang ada dalam perusahaan sehingga dapat ditindaklanjuti dan diberikan solusinya.

Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisis lebih dalam terkait pengungkapan lingkungan dilakukan secara wajib serta pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Unjuk kerja suatu perusahaan sangat penting diketahui oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. Dengan hal itu, secara otomatis keuntungan perusahaan dapat meningkat pula.

Berdasarkan uraian diatas mengenai latar belakang permasalahan dan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis akan meneliti hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan lingkungan dengan judul “PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN” (Studi Empiris pada Perusahaan yang tergabung dalam *National Centre Sustainability Reporting* pada Tahun 2009 - 2012).

1.2 Rumusan Masalah

Isu mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pengungkapannya merupakan isu terkini yang banyak diperdebatkan dan menarik perhatian para

peneliti. Suatu pengungkapan lingkungan yang didukung dengan *corporate governance* yang kuat merupakan kunci dari keberlangsungan sebuah perusahaan. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan mengkomunikasikan informasi ke berbagai stakeholders untuk menyesuaikan dengan harapan masyarakat (Ashforth dan Gibbs, 1990). Terkadang, informasi yang diungkapkan tidak sesuai dengan kinerja lingkungan perusahaan yang sesungguhnya (Cong dan Freedman, 2011). Hal tersebut dikarenakan perusahaan selalu ingin mendapatkan citra yang positif dari masyarakat atas usaha yang dilakukan. Selain itu, perusahaan yang memiliki kinerja ekonomi yang baik cenderung untuk tidak melaporkan kinerja lingkungannya (Donovan dan Gibson dalam Sembiring, 2002).

Suatu legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan Gibbs, 1990; Dowling dan Pfeffer, 1975; O'Donovan, 2002, Ghazali dan Chariri, 2007). Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam (Lindblom, 1994; Dowling dan Pfeffer, 1975; Ghazali dan Chariri, 2007). Ketidaksesuaian antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan *legitimacy gap* yang seringkali dapat mempengaruhi kelanjutan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan (Dowling dan Pfeffer, 1975; Ghazali dan Chariri, 2007).

Legitimacy gap dapat terjadi karena karena tiga alasan (Warticl dan Mahon, 1994; Ghazali dan Chariri, 2007): 1. Ada perubahan dalam kinerja

perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah; 2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah; 3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. Penelitian ini perlu dilakukan kembali untuk membuktikan bahwa pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu hasil kesesuaian antara nilai-nilai yang diinginkan perusahaan dengan masyarakat.

Penelitian pengungkapan lingkungan ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang memiliki perbedaan pengembangan teori, perumusan logika hipotesis, dan objek penelitian sehingga ada *research gap*. Contohnya terdapat perbedaan hasil penelitian antara Djoko Suhardjanto (2010) dan Yesika (2013) yang melakukan penelitian mengenai hubungan *Corporate Governance* dan pengungkapan lingkungan. Djoko Suhardjanto (2010) menemukan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan Yesika (2013) menemukan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut belum mampu membahas secara mendalam dan riil ke dalam suatu kasus tentang pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan yang sesungguhnya serta terdapat beberapa perbedaan hasil yang perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi unjuk kerja (*performance*) dari perusahaan sehingga dapat diketahui kinerja perusahaan, serta dapat

membuktikan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan berusaha untuk menjawab pertanyaan :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
4. Apakah proporsi direksi wanita berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan .
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan.

4. Untuk menganalisis pengaruh proporsi direksi wanita terhadap pengungkapan lingkungan.
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan lingkungan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada banyak pihak diantaranya :

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literatur yang membantu di dalam perkembangan ilmu akuntansi dan menambah wawasan tentang pengungkapan terhadap lingkungan yang sebenarnya atas aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Perusahaan

- a. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai acuan standar pelaksanaan operasi dan prosedur pengelolaan termasuk tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta perubahan proses produksi perusahaan.

- b. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai acuan koordinasi pelaksanaan pengungkapan lingkungan dengan *stakeholders*. Koordinasi ini penting agar diperoleh hasil pengungkapan lingkungan yang independen.
 - c. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan dalam penggunaan sumber daya melalui efisiensi bahan baku dan bahan penolong, alat identifikasi melalui proses daur ulang atau penerapan produksi bersih dan penghematan energi.
 - d. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan untuk menghindari kerugian finansial seperti penutupan / penghentian operasional kegiatan oleh Pemerintah dan menghindari sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan standar lingkungan.
4. Bagi Masyarakat
- a. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai jaminan untuk menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - b. Hasil penelitian mengenai pengungkapan lingkungan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penuntutan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Jika pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dipandang masyarakat belum sesuai dengan apa yang diharapkannya maka masyarakat dapat

ikut berpartisipasi dengan mengungkapkan aspirasinya terhadap kegiatan pengungkapan lingkungan sebagai salah satu bentuk penuntutan kepada perusahaan tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian akan disusun menjadi 5 bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang definisi pengungkapan lingkungan, fenomena pengungkapan lingkungan, peraturan perundang-undangan pengungkapan lingkungan, serta alasan yang mendasari penelitian ini. Perumusan masalah berisi tentang apa saja masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian berisi tentang apa yang akan dicapai dari penelitian ini. Sedangkan manfaat penelitian berisi tentang hasil apa saja yang bisa diperoleh bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dengan adanya penelitian ini.

BAB II. TELAAH PUSTAKA

Pada bab II ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Dalam bab ini dibahas pula mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan bagaimana kerangka teoritis dari penelitian ini serta memaparkan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab III ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dibahas mengenai sumber data, metode pengumpulan

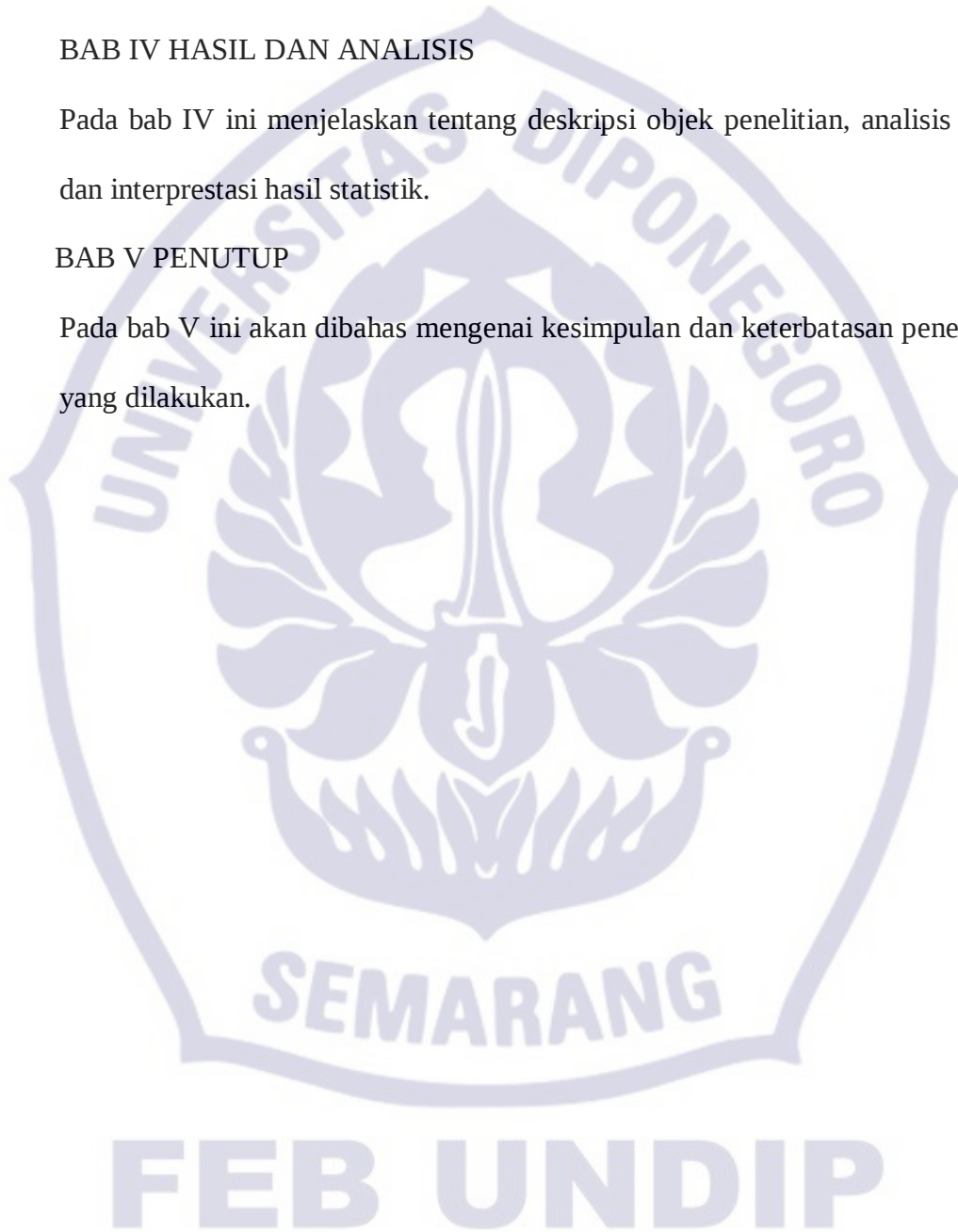
data, dan setting tempat serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada bab IV ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

BAB V PENUTUP

Pada bab V ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai: (i) teori agensi dan teori legitimasi yang menjadi landasan teori penelitian ini dan konsep-konsep mengenai *enviromental reporting* meliputi definisi, penyebab, dan akibat yang ditimbulkan serta penjelasan konsep mengenai mekanisme *corporate governance*, (ii) uraian mengenai penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, (iii) pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian penelitian terdahulu yang dirangkai dengan kerangka pemikiran.

2.1 Landasan Teori

Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi yang menyatakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen dan teori legitimasi yang menyatakan bahwa terdapat suatu kontrak sosial antara perusahaan yang beroperasi sebagai pemakai sumber ekonomi dengan masyarakat sekitar yang dapat merugikan perusahaan terkait dengan keberlangsungan usahanya apabila melanggar kontrak sosial.

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam sebuah hubungan keagenan, terjadi sebuah kontrak antara satu atau lebih pihak, yaitu pemilik (prinsipal), dengan pihak lain, yaitu agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal. Prinsipal yang dimaksud adalah pemegang saham (investor) sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah manajemen

perusahaan. Berdasarkan pendelegasian wewenang pemilik kepada agen, manajemen sebagai agen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Kepentingan kedua pihak tersebut tidak selalu sejalan sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Agen berkewajiban memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham (prinsipal) tetapi di sisi lain manajer juga bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Secara tidak langsung dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut akan memicu adanya konflik kepentingan. Konflik yang terjadi antara agen dan prinsipal disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika manajer sebagai pihak internal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan *stakeholders* sebagai pihak eksternal. Dengan adanya hubungan kontrak kedua belah pihak maka terjadinya manipulasi untuk meningkatkan utilitas masing-masing sangat mungkin terjadi (Jensen dan Meckling, 1976).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah agensi adalah dengan menggunakan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Banyak peneliti yang menyarankan mekanisme *corporate governance* sebagai salah satu solusi untuk masalah agensi (Eng dan Mak, 2003; Shan, 2009). Selain itu, *corporate governance* juga sebagai salah satu cara untuk mengurangi kurangnya komitmen atas manajemen yang timbul akibat masalah agensi (Bergolf dan Pajuste, 2005).

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia menyatakan salah satu tujuan pelaksanaan *corporate governance* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial mengharuskan perusahaan bertanggung jawab kepada multilevel *stakeholder* untuk melaporkan keberlanjutan perusahaan secara sukarela (Sun *et al.* 2009). Pengungkapan lingkungan sebagai salah satu tanggung jawab sosial perusahaan merupakan cara untuk mengalihkan perhatian pemegang saham dari isu lainnya. Aspek *corporate governance* seperti dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi direksi wanita dalam perusahaan serta ukuran komite audit merupakan mekanisme pengendali yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi menekankan bahwa ada kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Berdasarkan hal tersebut, maka merupakan tanggung jawab organisasi untuk melaporkan dampak total terhadap masyarakat luas. “Kontrak sosial” tidak mudah didefinisikan tetapi konsepnya telah digunakan untuk merepresentasikan banyak pengharapan secara implisit dan eksplisit dari masyarakat tentang bagaimana organisasi seharusnya bersikap terhadap operasinya. Menurut teori ini, kelangsungan hidup organisasi selama ini berasal dari kekuatan pasar dan harapan masyarakat. O’Donovan

(2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung kelangsungan hidup suatu perusahaan (*going concern*).

Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka dirasakan oleh kelompok luar sebagai sesuatu yang sah (*"legitimate"*). Menurut Lindblom (Deegan, 2000) legitimasi adalah :

“...sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.”

Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik (Deegan dan Rankin, 1996). Jika organisasi tidak dapat membenarkan operasi berlanjut, maka hal itu berarti bahwa masyarakat dapat mencabut "kontrak" untuk melanjutkan operasinya. Hal ini dapat terjadi melalui pengurangan konsumen atau menghilangkan permintaan untuk produk-produk dari bisnis, faktor pemasok menghilangkan pasokan tenaga kerja dan modal keuangan untuk bisnis, atau konstituen melobi pemerintah untuk meningkatkan pajak, denda atau undang-undang untuk melarang tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Deegan dan Rankin, 1996).

Shocker dan Sethi dalam Ghazali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut :

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial-baik eksplisit maupun implisit-dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada :

1. Hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan *power* yang dimiliki

Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber *power* institutional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh karena itu suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan (*reward*) yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007)

Dowling dan Pfeffer (dalam Ghazali dan Chariri, 2007) mengatakan bahwa legitimasi tidak dapat didefinisikan hanya dengan mengatakan “apa yang legal atau ilegal”. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat “implisit” dan “eksplisit”, Menurut Deegan (dalam Ghazali dan Chariri, 2007) bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal sementara bentuk implisitnya adalah “harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal (*uncodified community expectation*)”.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori legitimasi diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu contoh implementasi harapan dari masyarakat terhadap suatu organisasi atau perusahaan adalah pelaporan lingkungan yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari operasi produksi suatu organisasi untuk meninjau dampak atau akibat apa saja yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. Pelaporan lingkungan tersebut juga dapat dikatakan sebagai pengawasan pengungkapan lingkungan yang diberikan agar apabila operasi produksi yang dilakukan berhubungan dengan pengambilan unsur dari lingkungan sekitar maka tidak melanggar peraturan yang ada dan tidak merugikan masyarakat. Selain itu, pelaporan lingkungan ini juga menjawab rasa penasaran masyarakat sekitar terhadap perusahaan dan masalah lingkungannya yang meletakkan harapannya agar perusahaan dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka dirasakan oleh kelompok luar sebagai sesuatu yang sah (*"legitimate"*).

2.2 Pengungkapan Lingkungan

Pengungkapan (*disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan adalah alat yang penting untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan hidup dan sosial suatu perusahaan (Agrifood, 2004 dalam Suhardjanto dan Miranti 2010). Berdasarkan banyaknya tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan , maka perusahaan harus menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (*profit*) dengan kinerja sosial (*people*) dan kinerja lingkungan (*planet*) atau disebut *triple bottom-*

line performance (Elkington's, 1998). *Triple Bottom Line* (TBL), seperti yang dibahas diatas, adalah hasil dari perusahaan-perusahaan yang mengakui mereka memiliki tanggung jawab yang lebih luas terhadap masyarakat termasuk pemegang saham dan kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas. Menurut CPA (2002), TBL adalah metode dimana organisasi dapat melegitimasi operasi mereka dalam hal keberlanjutan jangka panjang. Penyelarasan ketiga kinerja tersebut pada akhirnya akan membuat perusahaan dapat menjalankan operasinya secara legal dalam jangka panjang dan mampu menghasilkan keuntungan yang berlimpah atau keuntungan yang konsisten secara terus menerus.

Disclosure meliputi ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, dapat dibuat di dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*) atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews, 1985 dalam Sembiring 2005). Pengungkapan informasi berisi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungan hidupnya (Belkaoui, 2000 dalam Yusnita 2010).

Tinker et al (1991) dalam Ghazali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa Pengungkapan Sosial dan Lingkungan (PSL) pada dasarnya merupakan refleksi atas munculnya konflik sosial kapitalis dengan kelompok lain (seperti pekerja, kelompok pecinta lingkungan, konsumen dan lainnya). Tinker dan Niemark (1984) dalam Ghazali dan Chariri (2007) yakin bahwa:

“...publik, secara umum, menjadi makin sadar atas konsekuensi negatif dari pertumbuhan perusahaan... Publik menekan bisnis dan pemerintah untuk mengeluarkan dana guna memperbaiki atau mencegah lingkungan fisik, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen, pekerja dan mereka yang tinggal

di lingkungan dimana produk dibuat dan limbah dibuang, dan untuk bertanggung jawab terhadap konsekuensi timbul dari adanya penutupan pabrik dan pengangguran karena teknologi.”

Beberapa hal penting dibahas oleh Deegan (2002) yaitu: keinginan untuk memenuhi persyaratan hukum, pertimbangan rasionalitas ekonomi, akuntabilitas dan tanggung jawab keyakinan, sesuai dengan persyaratan meminjam, harapan masyarakat, daya tarik investasi dana, etis dan kesempatan untuk menang penghargaan pelaporan. Namun, organisasi memiliki keinginan untuk melegitimasi operasi mereka dianggap salah satu motivasi utama dan dianut oleh banyak peneliti (Cho dan Patten, 2007; Deegan, 2002; de Villiers dan van Staden, 2009; Donovan, 2002 a, b; van Staden dan Hooks, 2007). Lebih lanjut, Adams dan Zutshi (2004) percaya bahwa pelaporan lingkungan dapat meningkatkan pengembalian keuangan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan walaupun mungkin tidak akan dapat diukur.

Deegan (1999, p.40) menganggap bahwa pelaporan lingkungan adalah penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang organisasi dan memastikan bahwa tidak ada hal yang dapat merusak reputasi dan kelangsungan hidup dari organisasi. Argumen yang mendukung untuk pelaporan lingkungan menunjukkan bahwa profitabilitas entitas, serta keberadaannya, dapat terpengaruh oleh kinerja lingkungan. Lebih lanjut, Gibson dan O'donovan (2007) menyatakan bahwa peningkatan pelaporan lingkungan dapat dicapai dengan *corporate governance* yang kuat, yang mencakup penyediaan informasi lingkungan untuk *stakeholder*. Dengan demikian, meskipun ada indikasi bahwa *corporate governance*

memainkan peran dalam pelaporan lingkungan, hanya jumlah terbatas dari penelitian yang telah dilakukan yang menganggap hubungan ini.

Pengungkapan informasi lingkungan hidup perusahaan masih bersifat *voluntary, unaudited dan unregulated* (Mathews, 1984 dalam Suhardjanto 2010). Namun demikian, banyak institusi yang telah menggunakan pedoman sebagai indikator, diantaranya adalah *Global Reporting Initiatives* (GRI). GRI merekomendasikan beberapa aspek lingkungan yang harus diungkapkan dalam *annual report*. Ada 30 item yang direkomendasikan oleh GRI dan terdiri dari 9 aspek utama. Kesembilan aspek tersebut adalah: material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi dan limbah, produk dan jasa, ketaatan pada peraturan, transportasi, serta keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pengungkapan informasi lingkungan hidup di dalam laporan tahunan pada awalnya merupakan sesuatu yang masih bersifat *voluntary* atau sukarela, sehingga ada tidaknya pengungkapan ini dalam laporan tahunan bergantung pada peraturan dan pengawasan masing-masing perusahaan (Ahmad dan Sulaiman, 2004). Namun, pada saat ini pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia telah menjadi kewajiban bagi perseroan terbatas untuk mengungkapkannya dalam laporan keberlanjutan maupun dalam laporan tahunan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, pada pasal 66 ayat 2 bagian c tertulis bahwa dalam laporan tahunan diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sedangkan pasal 74 ayat 1 tertulis bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penelitian Pfeiger, *et al.* (2005) menunjukkan bahwa usaha pelestarian lingkungan hidup oleh perusahaan akan memberikan banyak keuntungan, diantaranya adalah meningkatnya ketertarikan para investor dan *stakeholder* terhadap keuntungan perusahaan akibat pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab dalam penilaian masyarakat.

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa lepas dari konflik sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang semakin memperhatikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* termasuk di dalamnya *environmental disclosure* (pengungkapan informasi lingkungan). Dengan semakin banyaknya penelitian akuntansi mengenai *environmental disclosure* maka diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pengungkapan di Indonesia.

2.3 Corporate Governance

2.3.1 Definisi Corporate Governance

Pertama kali, Istilah *corporate governance* diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang menentukan praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* sebagai: “seperangkat sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD), mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance adalah sistem dimana perusahaan bisnis diarahkan dan diawasi. Struktur tata kelola perusahaan menentukan pendistribusian hak dan tanggung jawab antara peserta yang berbeda dalam corporation, seperti dewan, manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan merinci aturan dan prosedur pengambilan keputusan pada urusan perusahaan. Dengan melakukan ini, juga menyediakan struktur melalui mana tujuan perusahaan ditetapkan, dan cara mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja. ”

Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Surat Edaran Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. S-106/M-PM.PBUMN/2000 mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“*Corporate governance* adalah segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.”

Banyak peneliti yang menyarankan mekanisme *corporate governance* sebagai solusi untuk masalah agensi (Eng dan Mak, 2003; Shan, 2009). Meskipun *corporate governance* merupakan solusi potensial untuk masalah agensi, *corporate governance* secara lebih luas terkonsentrasi pada melindungi minat dari *stakeholder* (Canadian Institute of Chartered Accountants, 1995; Donnelly and Mulcahy, 2008; Wise dan Ali, 2008). Maka diharapkan bahwa dengan adanya sistem *corporate governance* yang efektif tersebut memiliki efek positif pada kinerja korporasi, baik keuangan dan non-keuangan.

Corporate governance mendorong perusahaan untuk mempromosikan etika, keadilan, transparansi dan akuntabilitas di semua hubungan mereka (Jamali et al., 2008) dan meningkatkan sebuah pengungkapan berbasis lingkungan di mana manajer adalah dipaksa untuk bertindak bagi kepentingan pemegang saham dan para *stakeholder* (Hamilton, 2004). Perusahaan dengan struktur *governance* yang efektif akan menyediakan dokumen lebih banyak ke pasar (Beekes et al., 2008). Lebih lanjut, perusahaan yang lebih mungkin untuk menghilangkan bahan informasi yang relevan kepada stakeholder dengan tidak adanya persyaratan wajib dan mekanisme tata kelola yang tidak efektif (Unerman et al., 2007, dikutip dalam Mathews, 2008) dan masalah asimetri informasi ini bisa diatasi dengan *good corporate governance*, khususnya oleh direksi yang efektif (Donnelly dan Mulcahy, 2008).

2.3.2 Prinsip dasar Corporate Governance

Prinsip dasar GCG yang disusun terutama oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*), berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi secara terbuka, benar, kredibel, tepat waktu, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas informasi.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), prinsip ini berhubungan dengan adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban yang mengendalikan organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku .
4. Independensi (*Independency*), atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Struktur Corporate Governance

Menurut FCGI, dalam suatu praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*), terdapat dua sistem *corporate governance* yang berbeda, yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda. Sistem tersebut adalah *one tier system* dari Anglo Saxon dan *two tier system* dari Kontinental Eropa. Negara-negara dengan *one tier system* misalnya Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara dengan *two tiers system* adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Di Indonesia, sistem yang digunakan yaitu *two tiers system* untuk struktur dewan dalam perusahaan.

Dalam *two tier system* ini, terdapat dua organ perusahaan yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Menurut Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Sistem *corporate governance* yang efektif memiliki efek positif pada kinerja korporasi secara umum, baik keuangan maupun non-keuangan. *Corporate governance* mendorong perusahaan untuk mempromosikan etika, keadilan, transparansi dan akuntabilitas di semua hubungan mereka (Jamali *et al.*, 2008) dan meningkatkan sebuah pengungkapan berbasis lingkungan di mana manajer adalah dipaksa untuk bertindak bagi kepentingan pemegang saham dan para *stakeholder* (Hamilton, 2004). Salah satu studi baru-baru ini (Beekes *et al.*, 2008) ditemukan bahwa firma-firma dengan *corporate governance* yang efektif menyediakan lebih banyak dokumen ke pasar. Itu karena dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari *good corporate governance* akan meningkatkan keterbukaan dari pengungkapan perilaku organisasi-organisasi. Pengaruh tersebut dari *corporate governance* di pengungkapan perilaku organisasi dalam bagian pengungkapan lingkungan tertentu adalah fokus studi ini.

2.3.3.1. Dewan Komisaris Independen

Independensi dewan komisaris adalah permasalahan *corporate governance* yang paling diperdebatkan dihadapi oleh perusahaan. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris,

serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Komisaris independen memiliki peran penting bagi perusahaan. Hal tersebut diterima secara luas bahwa independensi dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas dewan serta kinerja perusahaan secara keseluruhan (Bonn, 2004 ; Shah *et al.*, 2008; O'Neal dan Thomas, 1995).

Menurut Keputusan Ketua Bapepam No. 29/PM/2004, komisaris independen didefinisikan sebagai anggota komisaris yang: (i) berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, (ii) tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan, (iii) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama dari emiten atau perusahaan publik, (iv) dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Direktur dari luar perusahaan biasanya dapat lebih baik dalam memonitor tanggung jawab manajemen pada posisi non resmi dalam organisasi (Donnelly dan Mulcahy, 2008) dan memiliki insentif untuk membangun reputasi sebagai ahli monitor yang menghalangi mereka dari persekongkolan dengan di dalam direksi (Carter *et al.*, 2003).

2.3.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan konsentrasi ini dianggap sebagai aspek penting dari tata kelola perusahaan apakah itu tersebar atau terkonsentrasi (Habib dan Jiang, 2009;

Shan, 2009). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan) dan diukur dengan presentase saham dipegang oleh pemegang saham institusional. Masalah keagenan utama dalam perusahaan dengan kepemilikan institusional ini adalah konflik antara pemegang perusahaan dengan pemegang saham minoritas. Apabila tidak terdapat hukum yang memadai, pemegang saham pengendali dapat melakukan aktivitas yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham lain (Tarjo, 2008). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Arif 2006 dalam Machmud & Djaman 2008).

Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi dikuasai oleh pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan yang substansial sehingga memiliki kepentingan yang besar terhadap kinerja perusahaan. Pemegang saham tersebut dapat mengawasi kinerja perusahaan dan perilaku manajemen dalam rangka melindungi kepentingan investasi di dalam perusahaan. Oleh karena itu, di bawah kepemilikan terkonsentrasi, manajer dapat lebih mempengaruhi nilai perusahaan termasuk nilai lingkungan (Halme dan Huse, 1997) serta untuk melindungi kepentingan pemegang saham dalam perusahaan dan maka organisasi itu sendiri menjadi kurang independen di bawah kepemilikan sangat terkonsentrasi.

2.3.3.3 Ukuran dewan komisaris

Di Indonesia, sistem *corporate governance* yang digunakan yaitu *two tiers system* untuk struktur dewan dalam perusahaan dimana terdapat dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam hal ini, suatu ukuran dewan komisaris bisa dilihat dari

jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan tersebut. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Tugas dewan komisaris dijelaskan secara lebih terperinci pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 1 dan 2 yaitu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Semakin efisien suatu perusahaan maka akan berdampak pada semakin efisiennya sistem laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan semakin meningkatnya laporan yang dibuat secara sukarela seperti pelaporan mengenai lingkungan.

2.3.3.4 Proporsi direksi wanita

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya pada masa saat ini tidak lepas dari tangan para wanita. Tidak hanya pria saja yang dibutuhkan untuk memegang posisi penting dalam perusahaan seperti posisi direksi. Wanita yang dahulu sering dipandang lemah dan tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh pria justru pada saat ini sangat dibutuhkan di dalam suatu

perusahaan. Posisi direksi saat ini sedikit banyak sudah diperankan oleh para wanita karena wanita dinilai dapat lebih berkomitmen dalam keterlibatannya di suatu pekerjaan, lebih memiliki persiapan yang matang dibandingkan para pria dalam menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi, lebih rajin untuk mengajukan pertanyaan yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan akhirnya membuat suasana yang baik di ruang rapat. Demikian pula, Adams dan Ferreira (2004) menemukan bahwa lebih banyak wanita dalam perusahaan dapat meningkatkan proses pembuatan keputusan, meningkatkan efektivitas perusahaan dan bahwa wanita memiliki kehadiran/partisipasi lebih baik.

2.3.3.5 Ukuran komite audit

Dalam mewujudkan *good corporate governance* dihubungkan dengan adanya pengungkapan perusahaan dalam hal lingkungan maka diperlukan suatu pengawasan dan pengendalian yang efektif. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Ratnasari, 2010). Dengan demikian, dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak mengalami perkembangan, baik secara sukarela maupun wajib mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial, pelaporan *sustainability report*, dan juga

pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terutama lebih spesifik dalam pengungkapan tentang lingkungan dari segi non-keuangan terhadap kinerja keuangan. Pada sub-bab ini akan diuraikan mengenai penelitian- penelitian terdahulu tentang pengungkapan lingkungan dan *corporate governance* yang dilakukan peneliti- peneliti sebelumnya.

Penelitian de Villiers et al (2009) dengan sampel 100 perusahaan top di Amerika Serikat menggunakan kinerja lingkungan perusahaan sebagai variabel dependen serta ukuran perusahaan, investor institusional, proporsi direktur independen dan CEO rangkap sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja lingkungan perusahaan berhubungan positif dengan ukuran perusahaan, berhubungan negatif dengan investor institusional, berhubungan positif dengan proporsi dari direktur independen dan berhubungan negatif dengan CEO rangkap.

Penelitian yang dilakukan oleh Theodora Cety Yusnita (2010) untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap *enviromental performance* dan *enviromental disclosure*. Data dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dari 80 perusahaan peserta Program Peringkat Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2008 dari 627 perusahaan (Press Briefing PROPER,2009). Variabel dari penelitian ini adalah *enviromental performance*, *enviromental disclosure* dan proksi dari *corporate governance* dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, *leverage* dan profitablilitas. Hasil dari penelitian ini adalah proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap *enviromental performance*, serta jumlah rapat komite audit, proporsi

komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, *size* perusahaan, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *enviromental performance*. Proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *enviromental disclosure*, serta *size* perusahaan berpengaruh positif terhadap *enviromental disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Djoko Suhardjanto dan Novita Dian Permatasari (2010) untuk menganalisis pengaruh *corporate governance*, latar belakang *culture* dan latar belakang pendidikan komisaris utama terhadap *enviromental disclosure*. Data dari penelitian ini adalah laporan tahunan dari 90 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2007. Variabel dari penelitian ini adalah *enviromental disclosure* dan proksi dari *corporate governance* variabel kontrol ukuran perusahaan (*size*) dan tipe industri. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan *logistic regression* yaitu hanya ukuran perusahaan (*size*) yang berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* sedangkan berdasarkan analisis regresi berganda yaitu proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan (*size*) dan latar belakang *culture* komisaris utama berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian ini yang dilakukan oleh Kathyayini Kathy Rao, Carol A. Tilt dan Laurence H. Lester (2012) untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap *enviromental disclosure*. Data dari penelitian ini adalah sampel 100 perusahaan yang listing pada *Australian Stock Exchange* (ASX) pada tahun 2008. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *enviromental*

disclosure sebagai variabel dependen dan *corporate governance* sebagai variabel independen yang meliputi komisisaris independen (*board independence*), kepemilikan institusi (*institutional ownership*), ukuran dewan (*board size*) dan proporsi wanita dalam dewan (*proportion of female directors*). Hasil dari penelitian ini adalah proporsi komisisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, *institutional ownership* terdapat pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan, ukuran dewan terdapat pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan, proporsi wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahtiar Effendi, Lia Uzliawati dan Agus Sholikhan Yulianto (2013) untuk menganalisis pengaruh dewan komisisaris terhadap *enviromental disclosure*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *enviromental disclosure* sebagai variabel dependen, ukuran dewan komisisaris, proporsi dewan komisisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisisaris, dan jumlah rapat dewan komisisaris sebagai variabel independen serta *size*, *profitabilitas*, dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisisaris, proporsi dewan komisisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisisaris, jumlah rapat dewan komisisaris, *profitabilitas*, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Enviromental Disclosure*. Sedangkan *size* berpengaruh positif terhadap *Enviromental Disclosure*.

Penelitian tentang studi kali ini telah dilakukan pada beberapa penelitian sebelumnya antara lain :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Alat Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
De Villiers et al (2009)	Analisis Regresi Berganda	<i>Board Size</i> , Investor institusional, proporsi dari direktur independen, CEO rangkap	<i>Board size</i> berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan, investor institusional berpegaruh negatif dengan kinerja lingkungan, proporsi dari direktur independen berpengaruh positif dengan kinerja lingkungan dan CEO rangkap berpengaruh negatif dengan kinerja lingkungan.
Theodora Cety Yusnita (2010)	Analisis Regresi Berganda	Variabel Dependen: <i>Environmental Performance</i> dan <i>Environmental Disclosure</i> Variabel Independen: Proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, Proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris Variabel kontrol: Ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas	Proporsi komite audit independen berperngaruh positif terhadap <i>enviromental performance</i> , serta jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, size perusahaan, leverage dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>enviromental performance</i> . Proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, leverage dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>enviromental disclosure</i> , serta ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>enviromental disclosure</i> .

Djoko Suhardjanto dan Novita Dian Permatasari (2010)	Analisis <i>Logistic Regression</i> dan Regresi Berganda	Variabel dependen: <i>Enviromental Disclosure</i> Variabel independen : proporsi komisaris independen, latar belakang <i>culture</i> atau etnis komisaris utama, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit. Variabel kontrol: ukuran perusahaan (<i>size</i>) dan tipe industri.	Berdasarkan <i>logistic regression</i> yaitu hanya <i>firm size</i> yang berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>. Berdasarkan analisis regresi berganda yaitu proporsi dewan komisaris independen, <i>firm size</i> dan latar belakang <i>culture</i> komisaris utama berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>.
Kathyayini, <i>et al.</i> (2012)	Analisis Regresi Linear	Variabel dependen : <i>enviromental disclosure</i> Variabel independen: Proporsi Komisaris Independen, <i>Institutional Ownership</i>, Ukuran	Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan, <i>institutional ownership</i> terdapat pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan, ukuran dewan terdapat pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan, proporsi wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

		Dewan, Proporsi wanita dalam dewan direksi Variabel kontrol: ukuran perusahaan (<i>firm size</i>), profitabilitas dan jenis industri	
Bahtiar Effendi, Lia Uzliawati dan Agus Sholikhon Yulianto (2013)	Analisis Regresi Berganda	Variabel dependen : <i>Enviromental Disclosure</i> Variabel independen : ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris. Variabel kontrol: <i>size</i>, <i>profitabilitas</i>, dan <i>leverage</i>	Ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, <i>profitabilitas</i>, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Enviromental Disclosure</i>. Sedangkan <i>size</i> berpengaruh positif terhadap <i>Enviromental Disclosure</i>.

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Tabel 2.1 di atas merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu terhadap topik yang serupa. Penelitian terdahulu hampir rata – rata seluruhnya membahas

variabel mengenai dewan komisaris dan komite audit baik dari segi struktur maupun dari segi mekanisme *corporate governance* nya. Namun, beberapa penelitian diatas telah mengalami perkembangan variabel dari komponen *corporate governance*. Perkembangan variabel yang dimaksud ini seperti adanya variabel kepemilikan institusional dan proporsi direktur wanita dalam dewan direksi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Kathyayini Kathy Rao, Carol A. Tilt dan Laurence H. Lester (2012). Namun demikian, penelitian ini berbeda dalam beberapa hal yaitu variabel ukuran dewan komisaris (*board size*) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia menerapkan sistem dua tingkat atau *two tier board system* yang memisahkan fungsi direksi dan fungsi pengawasan (dewan komisaris), serta terdapat penambahan variabel independen yaitu jumlah komite audit untuk lebih memperkuat penelitian pengaruh *corporate governance* terhadap *enviromental disclosure* . Selain itu pengambilan sampel penelitian dilakukan di Indonesia dengan berfokus pada perusahaan - perusahaan yang tergabung dalam National Centre Sustainability Reporting (NCSR) selama tahun 2009-2012.

2.5 Kerangka pemikiran

Hubungan logis antar variabel-variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dan dijabarkan dalam sub-bab kerangka pemikiran ini. Sebelum penyajian gambar mengenai kerangka pemikiran teoritis akan dijelaskan uraian mengenai hubungan *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan .

Berikut ini merupakan suatu penjelasan mengenai pengaruh hubungan antar variabel dependen dan independen. Beberapa tahun belakangan ini, laporan

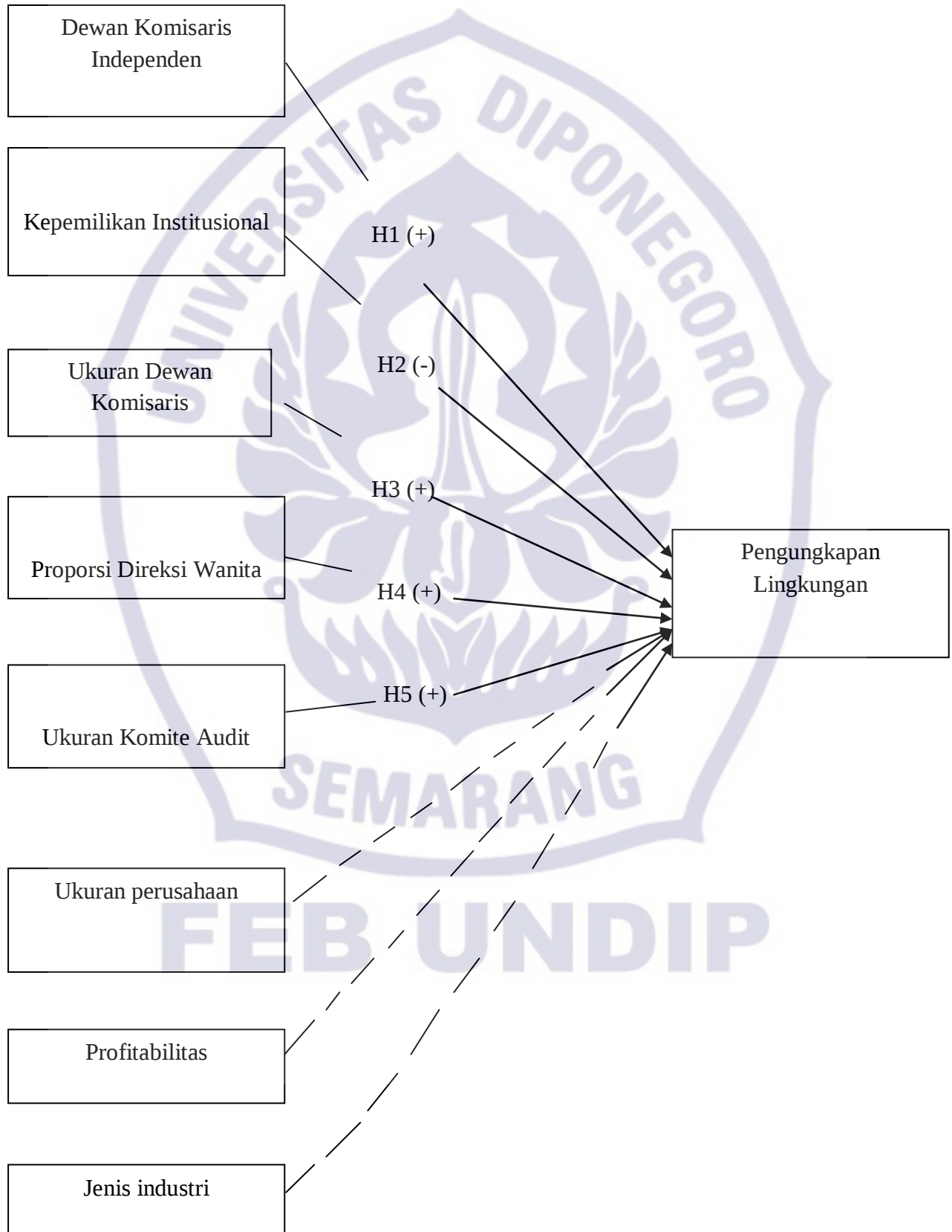
tahunan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tidak serta merta hanya berpusat pada laporan keuangan saja, tapi juga di dalamnya terdapat unsur – unsur non – keuangan seperti suatu pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Perusahaan yang mampu melaksanakan aktivitas bisnis perusahaan dalam proses produksinya dengan konsep ramah lingkungan untuk mengurangi dampak dari *global warming* tentu akan mampu menghasilkan pengungkapan lingkungan yang semakin baik. Demi transparansi pengungkapan lingkungan yang baik, Indonesia juga mulai mengeluarkan peraturan dan Undang-Undang mengenai pengelolaan lingkungan. Dengan begitu, secara tidak langsung terdapat dukungan dari pemerintah untuk mulai mewajibkan perusahaan yang aktivitas bisnisnya berpengaruh terhadap lingkungan agar melakukan pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan maupun laporan berkelanjutan.

Pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan atau laporan berkelanjutan dapat mencerminkan *good corporate governance*. Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan menerapkan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan peraturan yang ada akan termotivasi untuk memberikan pengungkapan lingkungan sukarela untuk menginformasikan investor atas strategi lingkungan untuk menunjukkan kesuksesan dari kinerja lingkungan perusahaan. Perusahaan yang menampilkan struktur *corporate governance* yang efektif akan menarik kepercayaan investor. Persepsi investor juga dipengaruhi oleh pengungkapan lingkungan. Para investor akan mengambil keputusan untuk menanamkan modal sahamnya di suatu perusahaan yang selalu menampilkan pengungkapan lingkungan yang berkualitas tinggi. Pernyataan di atas dibentuk

kerangka pemikiran teoritis untuk mempermudah pemahaman penelitian ini pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 di bawah merupakan hasil penggambaran secara logis hubungan antar variabel dalam penelitian yang dilakukan. Terdapat 5 variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam hipotesis 1 adalah dewan komisaris independen berpengaruh positif dengan variabel dependen pengungkapan lingkungan. Dalam hipotesis 2 variabel independen adalah kepemilikan institusional yang berpengaruh negatif dengan variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan. Dalam hipotesis 3 variabel independen adalah ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif dengan variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan. Dalam hipotesis 4 variabel independen adalah proporsi direksi wanita yang berpengaruh positif variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan. Dalam hipotesis 5 variabel independen adalah ukuran komite audit yang berpengaruh positif dengan variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan. Garis lurus memiliki arti bahwa adanya pengaruh antara variabel independen dengan dependen dan membentuk hipotesis dalam penelitian ini. Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan jenis industri merupakan variabel kontrol dan diwakili oleh garis putus-putus yang mengarah pada variabel dependen.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.6 Pengembangan Hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori yang digunakan dan penelitian- penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pembahasan terperinci terkait rumusan hipotesis disajikan sebagai berikut.

2.6.1 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Diterima secara luas bahwa dewan independen meningkatkan efektivitas dewan dan dengan demikian meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan (Bonn, 2004; Shah *et al.*, 2008; O'Neal dan Thomas, 1995). Berdasarkan teori agensi dijelaskan bahwa memiliki proporsi dewan komisaris independen yang semakin besar akan memudahkan dilakukan pengendalian serta pengawasan terhadap agen dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Dewan komisaris independen meningkatkan transparansi perusahaan dan secara sukarela mengungkapkan informasi tambahan (Chen dan Jaggi, 2000; Donnelly dan Mulcahy, 2008; Cheng dan Courtenay, 2006). Mereka adalah... kurang selaras dengan manajemen (Eng dan Mak, 2003, p. 331) dan karena itu memiliki kapasitas untuk memaksa manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (Cahaya *et al.*, 2009). Keberadaan Komisaris Independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, mereka

cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholdernya*.

Melalui ketentuan peraturan Pencatatan Efek BEI tanggal 1 Juli 2000 No. IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, keberadaan komisaris independen telah diatur. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris dalam dewan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Webb (2004) dalam Said, *et al.* (2009) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan dengan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungannya. Menurut De Villiers *et al.* (2009) dewan dengan lebih banyak komisaris independen memaksa para manajer untuk mengambil keputusan dalam mendukung kegiatan lingkungan, dan mereka menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang kuat memiliki lebih komisaris independen. Diharapkan karena ini dewan komisaris independen yang dianggap mewakili kepentingan *stakeholders* lainnya, mereka akan memiliki lebih berpengaruh pada pelaporan lingkungan (Haniffa dan Cooke, 2005). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1. Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

2.6.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan

Kepemilikan konsentrasi dianggap sebagai aspek penting dari *corporate governance* apakah itu tersebar atau terkonsentrasi (Habib dan Jiang, 2009; Shan, 2009). Kepemilikan institusional adalah salah satu bentuk kepemilikan terkonsentrasi dan diukur dengan persentase saham dipegang oleh pemegang saham institusional. Mereka termasuk bank dan pemasok dana untuk pasar keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun dan perusahaan investasi (Lakhal, 2005).

Memiliki mayoritas investor institusional dapat mengurangi efektivitas dewan. Investor besar lebih cenderung mendominasi dan mempengaruhi keputusan manajemen (Lau *et al.*, 2009) karena mereka memegang saham dalam jumlah besar dalam perusahaan. Hal ini menyebabkan kurangnya aktivitas perusahaan serta kurangnya direksi independen (Bergolf dan Pajuste, 2005) dan kadang-kadang bahkan mungkin membatasi atau membatasi keputusan manajer (Lakhal, 2005).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), peningkatan permintaan untuk informasi adalah karena pemisahan kepemilikan dan kontrol. Pemegang saham institusional akan meminta pengungkapan yang lebih banyak agar dapat mengakses informasi internal dengan mudah. Namun, pemegang saham menginginkan dapat dengan mudah untuk mengakses informasi yang diinginkan, dan di lain pihak pemegang saham dapat menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi yang minimum terhadap publik (Laidroo, 2009). Ini

akhirnya mengakibatkan penurunan pengungkapan keseluruhan yang dibuat oleh perusahaan. Studi ini juga menunjukkan bahwa investor institusional yang memiliki kurang dari 25 persen kontrol kepemilikan terbatas atas perusahaan, dan untuk menarik modal dari sumber lain, perusahaan harus memberikan lebih banyak keterbukaan. Bertentangan dengan pandangan ini, penelitian sebelumnya telah berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara pengungkapan dan kepemilikan institusional (Donnelly dan Mulcahy, 2008; Laidroo, 2009). Akan tetapi, sebagian besar studi telah menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan perusahaan (Habib dan Jiang, 2009; Shan, 2009; Lakhal, 2005). Pemegang saham yang kuat sering memiliki lebih banyak pengaruh pada keputusan manajemen dan maka organisasi itu sendiri menjadi kurang independen di bawah kepemilikan sangat terkonsentrasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan.

2.6.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dengan pengungkapan lingkungan

Ukuran dewan, yaitu jumlah dewan komisaris di perusahaan, memainkan peran penting dalam pemantauan kinerja perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan memudahkan dilakukan pengendalian terhadap agen dan mencegah terjadinya penyimpangan. Ukuran dewan komisaris telah ditemukan hubungannya baik positif maupun negatif yang terkait dengan kinerja perusahaan.

Lebih kecil ukuran dewan komisaris maka lebih efektif dalam pemantauan tindakan manajemen (Lakhal, 2005) dan dapat berfungsi secara efektif seperti mereka dapat membuat keputusan bulat dengan mudah (Jensen, 1993; Cheng, 2008). Penelitian lain berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris lebih besar lebih efektif karena mereka dapat membawa lebih banyak pengalaman, pengetahuan dan menawarkan saran yang lebih baik (Dalton *et al.*, 1999; Bonn, 2004). Ukuran dewan komisaris yang besar akan meningkatkan kemampuan monitoring perusahaan dan berkontribusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Pfeffer dan Salancik, 2003).

Banyak studi sebelumnya menghubungkan ukuran dewan dengan pengungkapan. Pengalaman dewan komisaris diukur dalam jajaran anggota dewan perusahaan sejak mereka lebih cenderung untuk berbagi pengalaman luas dan keahlian mereka dalam pemantauan manajemen dan anggota dewan akan berperforma lebih baik (Kosnik, 1987 dalam Gul dan Leung, 2004). Mereka juga lebih cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk menjadi pengawas yang efektif manajemen dalam rangka menjaga reputasi modal mereka atau memperbaiki pasar tenaga kerja eksternal mereka (Kaplan dan Reishus, 1990). Menurut Collier dan Gregory (1999) dalam Sembiring 2005, semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

2.6.4 Pengaruh proporsi direksi wanita terhadap pengungkapan lingkungan

Tingkat keanekaragaman di perusahaan dapat mempengaruhi keputusan dan aktivitas mereka (Adams dan Ferreira, 2004). Teori agensi menjelaskan bahwa adanya direksi wanita dapat mengurangi konflik agensi dan mencegah terjadinya penyimpangan karena direksi wanita dapat mengelola perusahaan dengan baik untuk jangka panjang. Dengan adanya peningkatan perbedaan gender tersebut dapat dilihat bahwa perempuan dapat membuat kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Huse dan Solberg (2006) menemukan bahwa wanita lebih berkomitmen dan terlibat, lebih siap, lebih rajin, mengajukan pertanyaan dan akhirnya membuat suasana yang baik di ruang rapat. Demikian pula, Adams dan Ferreira (2004) menemukan bahwa lebih banyak wanita dalam perusahaan dapat meningkatkan proses pembuatan keputusan, meningkatkan efektivitas perusahaan dan bahwa wanita memiliki kehadiran/partisipasi lebih baik.

Selain kinerja perusahaan, memiliki lebih banyak direksi wanita pada perusahaan juga dapat memiliki efek positif pada pengungkapan, keuangan dan non keuangan; wanita pada perusahaan mungkin memiliki efek sinyal yang penting kepada pemangku kepentingan. Menurut Ibrahim dan Angelidis (1994) direktur wanita menunjukkan tanggung jawab besar, dalam analisa mereka, mereka menemukan bahwa wanita lebih didorong kedermawanannya dan kurang peduli dengan kinerja ekonomi. Argumentasi lain yang mendukung memiliki lebih banyak direksi wanita adalah bahwa mereka mampu meningkatkan independensi perusahaan (Kang *et al.*, 2007) dan independensi merupakan faktor

penting yang meningkatkan akuntabilitas, dan dengan demikian memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pengungkapan. Dengan kata lain, keterlibatan aktif direksi wanita, persiapan lebih baik, independensi dan kualitas unik lainnya, memungkinkan mereka untuk membuat kontribusi yang signifikan dalam diskusi yang kompleks dan keputusan seperti pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4. Proporsi direksi wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan

2.6.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit dengan pengungkapan lingkungan

Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang “Komite Audit” menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit tidak hanya harus terdapat di dalam perusahaan publik saja, tetapi menurut KNKG (2006), perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit.

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 dalam Said *et.al*, 2009). Berdasarkan

FCGI (2002), komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Hal ini dikarenakan untuk menjaga integritas serta objektivitas dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan.

Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik pengungkapan lingkungan perusahaan. Penelitian oleh Handayani dkk (2008) menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) dalam Said *et.al.* (2009) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Oleh karena itu, akan dibahas mengenai definisi dan operasionalisasi variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Berikut penjelasan secara rinci.

3.1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Secara umum dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan perusahaan mengenai lingkungan. Variabel pengungkapan lingkungan dilambangkan dalam variabel *env_disc*.

Pengungkapan lingkungan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan skor sesuai item pengungkapannya. Item pengungkapan lingkungan didasarkan pada pedoman indeks CSR yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). Pemilihan pengukuran menggunakan indeks GRI tidak menggunakan pengukuran dengan menghitung total kata – kata yang didedikasikan terhadap lingkungan dikarenakan menurut peneliti jumlah total kata-kata tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak dapat mencerminkan kinerja

perusahaan secara sebenarnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap lingkungan, selain itu pedoman indeks GRI merupakan pedoman yang sudah jelas memiliki indikator - indikator yang diakui secara Internasional serta telah digunakan di banyak negara. Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79 yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), dan sosial yang terdiri dari: praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), serta tanggung jawab produk (9 item). Variabel ini diukur dengan perbandingan antara jumlah item pengungkapan yang diungkapkan perusahaan dengan jumlah item pengungkapan lingkungan berdasarkan GRI.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel bebas atau independen sering disebut juga variabel predictor, stimulus, input, antecedent atau variabel yang mempengaruhi (Sekaran,2006). Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (terikat). Sehingga variabel independen dapat dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris Independen

Variabel dewan komisaris independen dinyatakan dengan lambang variabel p_inddir . Variabel p_inddir digunakan untuk menggambarkan bahwa terdapat pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG,2006).

Variabel ini diukur dengan perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah total semua komisaris.

2. Kepemilikan institusional (*institutional ownership*)

Kepemilikan institusional adalah salah satu bentuk kepemilikan terkonsentrasi dimana kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh suatu institusi (badan). Variabel independen kepemilikan institusional dinyatakan dengan lambang variabel *inst_inv*. Variabel *inst_inv* digunakan untuk menggambarkan kepemilikan saham oleh suatu institusi atau badan di dalam perusahaan. Variabel ini diukur dengan presentase saham dipegang oleh investor institusional (Kathy Rao, Carol A.Tilt dan Lester, 2012).

3. Ukuran dewan komisaris

Suatu ukuran dewan bisa dilihat dari jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan tersebut. Dewan komisaris yang dimaksud sangat berperan penting untuk mengawasi dan memantau kinerja dari perusahaan. Variabel independen ukuran dewan dinyatakan dengan lambang variabel *tot_kom*. Variabel ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan jumlah seluruh anggota yang duduk dalam dewan komisaris yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dilihat dari *annual report* masing-masing perusahaan (Kathy Rao, Carol A.Tilt dan Lester, 2012).

4. Proporsi direksi wanita

Tingkat keanekaragaman di perusahaan mempengaruhi keputusan dan aktivitas mereka (Adams dan Ferreira, 2004). Salah satu bentuk keanekaragaman itu adalah jenis kelamin. Dengan adanya peningkatan proporsi direksi wanita maka menunjukkan bahwa wanita dapat membuat kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Variabel independen proporsi direksi wanita dinyatakan dengan lambang variabel p_{femdir} . Variabel proporsi direksi wanita dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan seberapa kuat perusahaan tata kelolanya apabila dipimpin oleh seorang wanita sebagai direksi. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota direksi wanita yang ada dibandingkan dengan jumlah seluruh direksi yang ada dilihat dari *annual report* masing-masing perusahaan (Kathy Rao, Carol A.Tilt dan Lester, 2012).

5. Ukuran komite audit

Komite audit merupakan individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif (FCGI,2002). Variabel ini merupakan variabel tambahan untuk membedakan dengan penelitian terdahulu yang dipilih karena menurut KNKG komite audit merupakan komite yang sekurang-kurangnya harus dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan dan komite audit secara tidak langsung merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu fungsi serta

tugas pengawasannya terhadap dewan direksi. Variabel independen komite audit dinyatakan dengan lambang variabel *kom_dit*. Variabel *kom_dit* digunakan untuk menggambarkan peran pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan atas pengungkapan yang dilakukan. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan (Sun dkk, 2010).

3.1.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol untuk mengontrol variabel lain yang mempengaruhi faktor – faktor lain tentang pengungkapan lingkungan. Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat memberi pengaruh dan mengontrol hubungan variabel dependen dan variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur dari total aset dan pendapatan operasi yang mungkin juga mempengaruhi cakupan pengungkapan lingkungan di dalam laporan keuangan tahunan, profitabilitas yang diukur dari ROA dan jenis industri yang diukur dengan menggunakan variabel dummy.

1. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah alat untuk mengukur suatu perusahaan berdasarkan aturan tertentu. Banyak studi telah menemukan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan (Donnelly dan Mulcahy, 2008; Eng dan Mak, 2003; Gul dan Leung, 2004; Ho dan Wong, 2001; Laidroo, 2009; Lakhal, 2005). Ukuran

perusahaan yang digunakan dalam studi ini diukur dengan total aset dan pendapatan operasi. Pengukuran menggunakan total aset dan pendapatan operasi karena dua ukuran tersebut merupakan gambaran yang mewakili seberapa besar perusahaan tersebut.

2. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Variabel ini dinyatakan dengan lambang *ret_ta* dan diukur dengan menggunakan rasio perputaran aset (*return on asset*).

3. Industri

Klasifikasi industri yang dipakai dalam penelitian menggunakan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia yang termuat dalam *Fact Book* yang terbagi dalam 9 sektor industri menurut Bursa Efek Indonesia adalah: 1) *Agriculture* 2) *Mining* 3) *Basic Industry and Chemicals* 4) *Miscellaneous Industry* 5) *Consumer Goods Industry* 6) *Property, Real Estate and Building Construction* 7) *Infrastructure, utilities & transportation* 8) *Finance* 9) *Trade, Services & Investment*.

Klasifikasi yang terbagi dalam 9 kelompok jenis industri, kemudian akan diklasifikasikan lagi sesuai dengan data dalam penelitian, sehingga diperoleh klasifikasi sebagai berikut: 1) *Agriculture* 2) *Mining* 3) *Basic Industry and Chemicals* 4) *Miscellaneous Industry* 5) *Consumer Goods Industry* 6) *Property, Real Estate and Building Construction* 7) *Infrastructure, utilities & transportation* 8) *Finance* Jenis industri

merupakan variabel dummy. Industri yang tergolong klasifikasi tersebut diberi skor 1 dan industri lainnya diberi skor 0.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan *Sustainability Report*. Pemilihan populasi ini dikarenakan perusahaan yang mengungkapkan *Sustainability Report* tersebut yang lebih banyak melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya sesuai dengan variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu pengungkapan lingkungan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam NCSR (*National Centre Sustainability Reporting*) selama tahun 2009-2012. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria – kriteria tertentu.

Berdasarkan metode tersebut maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan - perusahaan yang tergabung dalam NCSR (*National Centre Sustainability Reporting*) tahun 2009-2012.
2. Perusahaan memiliki data yang lengkap mengenai pelaksanaan pengungkapan lingkungan (menggunakan indikator GRI) dan *corporate governance*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan yaitu berupa laporan keuangan tahunan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan

tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti (Sekaran, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan berkelanjutan pada tahun 2009 hingga tahun 2012 dari perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan dan memerlukan pengungkapan lingkungan di dalam sebuah laporan. Data berupa laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan dapat diperoleh di Pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau di www.idx.co.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data empiris berupa sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan (*annual report*) yang diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.com dan langsung dari *website* perusahaan. Data yang diambil dari *website* berupa data laporan tahunan perusahaan (*annual report*) perusahaan dan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) pada tahun 2009 - 2012 dengan cara *download* semua data laporan yang dibutuhkan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan langkah studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Selanjutnya adalah studi pustaka yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu didapat dari dokumen-dokumen, buku-buku, internet serta sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji regresi linear, statistik deskriptif juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini. Selain itu, dilakukan pengujian koefisien korelasi dalam penelitian ini. Berikut ini penjelasan terperinci mengenai metode analisis dalam penelitian ini:

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2011). Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran data. Data yang memiliki standar deviasi yang semakin besar menggambarkan data tersebut semakin menyebar. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji F dan t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2011).

Normalitas residual dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik)

pada sumbu diagonal dari grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun, pengujian dengan melihat data histogram dapat menyesatkan khususnya untuk sampel kecil. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan melihat histogram residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) :

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya digunakan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, di samping uji grafik perlu dilakukan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Adapun dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)

adalah:

- a. Jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual tidak berdistribusi normal.
- b. Jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* lebih besar dari 0.05 maka H_a ditolak. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari hal berikut (Ghozali, 2011):

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan dari suatu regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
- b. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.9) maka mengindikasikan adanya multikolonieritas.
- c. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan dengan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, dengan kata lain tidak heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau heteroskedastisitas (Ghozali, 2011):

- a. Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.
- b. Jika ada pola tertentu pada grafik scatterplot seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.
- c. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y grafik scatterplot maka mengindikasikan tidak ada heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik memiliki kelemahan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Oleh sebab itu, maka diperlukan uji statistik yang lebih akurat. Alat uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah Uji Glejser dengan persamaan sebagai berikut:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji

yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji autokorelasi adalah Run Test. Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

H₀: residual (res_1) random (acak)

H_A: residual (res_1) tidak random

3.5.3 Analisis Regresi Linear

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai hipotesis 5 adalah uji regresi linear dengan menggunakan SPSS. Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dan menunjukkan arah hubungan variabel dependen dan independen. Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Analisis regresi linear ini digunakan untuk menunjukkan arah hubungan variabel dependen (pengungkapan lingkungan) dan variabel independen (*corporate governance*). Dalam analisis regresi linear ini, presentase pengungkapan lingkungan diregresikan dengan lima variabel dari *corporate governance* yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi direksi wanita dan ukuran komite audit. Model analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{env_disc} = & \beta_0 + \beta_1 \text{p_inddir} + \beta_2 \text{inst_inv} + \beta_3 \text{tot_kom} + \beta_4 \text{p_femdir} + \\ & \beta_5 \text{cos_komdit} + \beta_6 \ln \text{tot_asst} + \beta_7 \text{op_rev} + \beta_8 \text{ret_ta} + \beta_9 \\ & \text{agri} + \beta_{10} \text{mining} + \beta_{11} \text{bas_ind} + \beta_{12} \text{aneka_ind} + \beta_{13} \\ & \text{cons_ind} + \beta_{14} \text{properti_ind} + \beta_{15} \text{infrastruktur_ind} + \beta_{16} \\ & \text{finance_ind} \end{aligned}$$

Dimana:

env_disc = presentase pengungkapan lingkungan

p_inddir = dewan komisaris independen

inst_inv = kepemilikan institusional

tot_kom = ukuran dewan komisaris

p_femdir = proporsi direksi wanita

komdit = ukuran komite audit

tot_asst = total aset

op_rev = pendapatan operasi

ret_ta = profitabilitas

ind = jenis industri

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (F test)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 10%. Jika nilai signifikansi $f < 0,1$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $f > 0,1$ artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (T test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Tingkat signifikan 10%, maka kriteria pengujian adalah :

1. Bila nilai signifikan $t < 0.1$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terdapat satu variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikan $t > 0.1$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terdapat variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan analisis hasil penelitian yang terdiri atas lima bagian. Bagian pertama merupakan deskripsi objek penelitian, bagian kedua analisis statistik deskriptif, yang merupakan gambaran variabel penelitian. Bagian ketiga merupakan analisis uji asumsi klasik, bagian keempat merupakan analisis regresi linear dan pada bagian terakhir disajikan analisis pengujian kesesuaian model regresi linear dalam penelitian ini. Penjelasan terperinci mengenai hasil dan pembahasan sebagai berikut.

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan – perusahaan yang tergabung dalam NCSR tahun 2019-2012 yang diseleksi berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut antara lain: Perusahaan – perusahaan yang sudah mengeluarkan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) selama tahun 2009-2012 yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan atas aktivitas bisnis yang telah dilakukan perusahaan selama satu tahun dan telah diungkapkan dalam sebuah laporan (indikator GRI) dan perusahaan menyajikan informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan *corporate governance*. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikeluarkan dari sampel penelitian. Berikut disajikan penjelasan objek penelitian dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Objek Penelitian

No	Keterangan	2012	2011	2010	2009
1.	Perusahaan yang tergabung dalam NCSR yang tersedia <i>sustainability report</i> -nya	20	20	34	20
2.	Sampel yang tidak memenuhi kriteria	5	5	19	5
3.	Sampel perusahaan yang mempunyai pengungkapan lingkungan secara lengkap dengan menggunakan indikator GRI	15	15	15	15
4.	Jumlah perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria	15	15	15	15
	Total data	60			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diperoleh 15 sampel perusahaan dengan pengungkapan lingkungan pada tiap tahunnya setelah proses pengumpulan data dilakukan. Data perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan dari tahun 2009 hingga 2012 yang memiliki pengungkapan lingkungan, sehingga jumlah total data dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 data. Setelah melalui tahap pengolahan data, semua data layak untuk dijadikan sebagai sampel penelitian, sehingga jumlah sampel akhir yang layak diobservasi yaitu sebanyak 60 data.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel-variabel dalam penelitian yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum di bawah menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik. Gambaran statistik dari masing-masing variabel dalam penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Nilai rata-rata	Std. Deviasi
env_disc	60	0,200	1,000	0,74277	0,302012
IND	60	0,222	0,800	0,43175	0,132871
inst_inv	60	0,00%	32,61%	3,71%	5,16%
tot_kom	60	4	13	6,60	2,027
p_femdir	60	0,00	0,40	0,0374	0,09852
KOM_DIT	60	3	7	3,88	1,290
tot_asset (dln juta)	60	5071797	540705764	78598432	120564325
Op_rev (dln juta)	60	2325282	232656456	39271426	55323392
ROA	60	-0,09595	0,40700	0,119235	0,110312
ind1	60	0	1	0,07	0,252
ind2	60	0	1	0,27	0,446
ind3	60	0	1	0,13	0,343
ind4	60	0	1	0,07	0,252
ind5	60	0	1	0,07	0,252
ind6	60	0	1	0,07	0,252
ind7	60	0	1	0,20	0,403
ind8	60	0	1	0,07	0,252
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa N atau jumlah total data setiap variabel yaitu 60 buah selama periode 2009 hingga 2012. *Enviromental disclosure* mempunyai nilai minimum sebesar 0,200, nilai maksimum sebesar 1.00, nilai rata – rata sebesar 0,74277 dan nilai standar deviasi sebesar 0,302012. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata – ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variasi pada data *enviromental disclosure*.

Dewan komisaris independen (*ind*) mempunyai nilai minimum sebesar 0,222, nilai maksimum sebesar 0,8, nilai rata – rata sebesar 0,43175 dan nilai standar deviasi sebesar 0,132871. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata – ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variasi pada data proporsi komisaris independen.

Institusional investor (*inst_inv*) mempunyai nilai minimum sebesar 0%, nilai maksimum sebesar 32.61%, nilai rata – rata sebesar 3,71% dan nilai standar deviasi sebesar 5,16%. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata – ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi pada data institusional investor.

Ukuran dewan komisaris (*tot_kom*) mempunyai nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar 13, nilai rata – rata sebesar 6,60 dan nilai standar deviasi sebesar 2,027. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata – ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variasi pada data ukuran dewan komisaris.

Proporsi dewan direksi wanita (gender) mempunyai nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 0,4 , nilai rata – rata sebesar 0,0374 dan nilai standar deviasi sebesar 0,09852. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata – ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi pada data proporsi dewan direksi wanita.

Ukuran komite audit mempunyai nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 7, nilai rata – rata sebesar 3,88 dan nilai standar deviasi sebesar 1,290. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata – ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variasi pada data ukuran komite audit.

Total aset (dalam juta) mempunyai nilai minimum sebesar 5.071.797, nilai maksimum sebesar 540.705.764, nilai rata-rata sebesar 78.598.432 dan nilai standar deviasi sebesar 120.564.325. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata – ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi pada data total aset.

Pendapatan operasi (dalam juta) mempunyai nilai minimum sebesar 2.325.282, nilai maksimum sebesar 232.656.456, nilai rata-rata sebesar 39.271.426 dan nilai standar deviasi sebesar 55.323.392. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata – ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi pada data pendapatan operasi.

Return On Assets (ROA) mempunyai nilai minimum sebesar -0,09595, nilai maksimum sebesar 0,40700, nilai rata – rata sebesar 0,119235 dan nilai standar deviasi sebesar 0,110312. Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai standar

deviasi lebih kecil daripada nilai rata – ratanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variasi pada data ROA.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji hipotesis, digunakan analisis regresi linear. Akan tetapi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah model regresi sudah baik atau belum. Model regresi dikatakan baik jika tidak terdapat penyimpangan terhadap asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2011).

Normalitas residual dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun, pengujian dengan melihat data histogram dapat menyesatkan khususnya untuk sampel kecil. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan melihat histogram residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) :

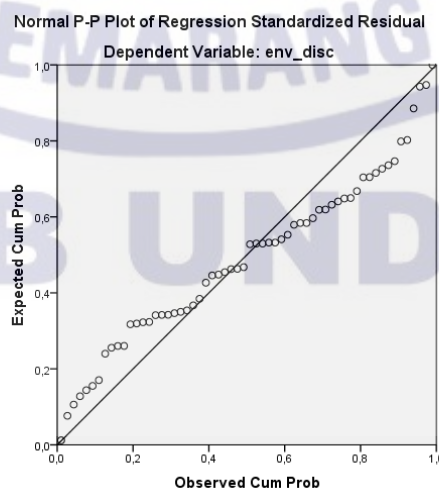
- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya digunakan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, di samping uji grafik perlu dilakukan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Adapun dasar pengambilan keputusan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah:

- Jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual tidak berdistribusi normal.
- Jika nilai *Asymp Sig (2 tailed)* lebih besar dari 0.05 maka H_a ditolak. Hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

Gambar 4.1
Normal P-Plot



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data residual menyebar di atas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan grafik, data residual terdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil analisis grafik, dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang hasilnya ditampilkan dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	0,13394472
	Absolute	0,118
Most Extreme Differences	Positive	0,118
	Negative	-0,105
Kolmogorov-Smirnov Z		0,916
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,371

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil uji K-S menunjukkan bahwa besarnya nilai K-S adalah 0,916 dan signifikan (nilai sig. 0,371). Hal ini berarti H_a ditolak, yaitu bahwa secara statistik data residual berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel

independen sama dengan nol. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari hal berikut (Ghozali, 2011):

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan dari suatu regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independen
- b. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.9) maka mengindikasikan adanya multikolonieritas.
- c. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan dengan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011). Hasil pengujian multikolinearitas ditampilkan dalam tabel 4.4.

Dari hasil pengujian didapat nilai *tolerance* masing-masing variabel dalam model di bawah yaitu lebih dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel dalam model di bawah adalah kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian.

Tabel 4.4
Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	IND	0,122	8,221
	inst_inv	0,413	2,419
	tot_kom	0,200	5,001
	p_femdir	0,229	4,373
	cos_komdit	0,567	1,763
	ln_TA	0,240	4,173
	Op_rev	0,280	3,578
	ROA	0,214	4,682
	ind1	0,349	2,866
	ind2	0,196	5,095
	ind3	0,294	3,401
	ind4	0,215	4,656
	ind5	0,100	9,992
	ind6	0,334	2,997
	ind7	0,186	5,387
	ind8	0,224	4,456

a. Variabel Dependen: env_disc

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, dengan kata lain tidak heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau heteroskedastisitas (Ghozali, 2011):

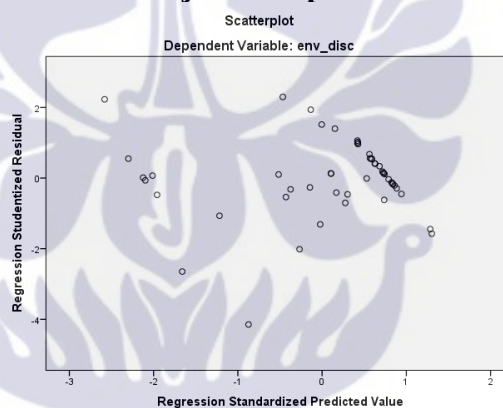
- Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat

dilihat dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

b. Jika ada pola tertentu pada grafik scatterplot seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

c. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y grafik scatterplot maka mengindikasikan tidak ada heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Uji Scatterplot



Analisis dengan grafik memiliki kelemahan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Oleh sebab itu, maka diperlukan uji statistik yang lebih akurat. Alat uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah Uji Glejser dengan persamaan sebagai berikut:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Hasil pengujian dengan uji glejser ditampilkan pada tabel 4.5. Dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut

(Abs_Ut). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi dalam penelitian tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,559	0,200		2,796	0,008
IND	-0,217	0,219	-0,297	-0,992	0,327
inst_inv	0,004	0,003	0,188	1,157	0,254
tot_kom	-0,009	0,011	-0,189	-0,811	0,422
p_femdir	0,077	0,215	0,079	0,360	0,720
cos_komdit	-0,024	0,020	-0,167	-1,210	0,233
ln_TA	-0,011	0,006	-0,423	-1,986	0,053
Op_rev	-4,437E-016	0,000	-0,249	-1,263	0,213
1 ROA	-0,131	0,199	-0,149	-0,659	0,513
ind1	-0,056	0,068	-0,145	-0,824	0,414
ind2	-0,016	0,051	-0,074	-0,316	0,754
ind3	0,001	0,055	0,004	0,021	0,984
ind4	0,073	0,087	0,188	0,835	0,408
ind5	0,008	0,127	0,021	0,063	0,950
ind6	-0,065	0,070	-0,167	-0,926	0,360
ind7	0,095	0,058	0,395	1,631	0,110
ind8	-0,001	0,085	-0,002	-0,008	0,994

a. Variabel Dependen: AbsUt

b. Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji autokorelasi adalah Run Test.

Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

H₀: residual (res_1) random (acak)

H_A: residual (res_1) tidak random

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,00086
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	36
Z	1,302
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,193

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa Nilai test adalah - 0,00086 dengan probabilitas 0,193 signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koesisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menghindari bias yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan R^2 , maka digunakan nilai *adjusted* R^2

untuk menilai seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel-variabel independennya. Hasil uji koefisien determinasi ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,896 ^a	0,803	0,730	0,156898

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Hasil pengujian pada model di atas menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,730. Hal ini berarti 73,0% variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu struktur *corporate governance* yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi direksi wanita, serta ukuran komite audit dan tiga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan jenis industri. Sisanya yaitu sebesar 27% pengungkapan lingkungan dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F Test)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, yang berarti semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) adalah tidak semua parameter secara

simultan sama dengan nol. Pedoman dalam mengambil keputusannya adalah jika nilai signifikan $> 0,1$ maka H_0 tidak ditolak, sedangkan jika nilai signifikan $\leq 0,1$ maka H_0 ditolak (Ghozali, 2011). Hasil dari uji statistik F ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,323	16	0,270	10,976	0,000 ^b
	Residual	1,059	43	0,025		
	Total	5,381	59			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai F hitung pada model ini adalah sebesar 10,976 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,1 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan lingkungan, atau dengan kata lain secara simultan variabel-variabel independen yang terdiri atas dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi direksi wanita, serta jumlah komite audit dan tiga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan jenis industri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan lingkungan.

4.2.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel

dependen (Ghozali, 2011). Tingkat signifikan 10%, maka kriteria pengujian adalah :

1. Bila nilai signifikan $t < 0.1$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terdapat satu variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikan $t > 0.1$, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terdapat variabel dependen. Hasil dari uji statistik t ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,649	0,403		-1,611	0,115
IND	-0,633	0,441	-0,279	-1,436	0,158
inst_inv	-0,011	0,006	-0,190	-1,804	0,078
tot_kom	-0,001	0,023	-0,006	-0,040	0,968
p_femdir	0,470	0,434	0,153	1,083	0,285
cos_komdit	0,071	0,040	0,160	1,786	0,081
ln_TA	0,037	0,011	0,456	3,304	0,002
Op_rev	4,290E-016	0,000	0,078	0,606	0,548
1 ROA	0,305	0,401	0,111	0,761	0,451
ind1	0,615	0,137	0,512	4,471	0,000
ind2	0,732	0,103	1,080	7,077	0,000
ind3	0,823	0,110	0,934	7,486	0,000
ind4	0,394	0,175	0,328	2,246	0,030
ind5	0,926	0,257	0,771	3,606	0,001
ind6	0,802	0,141	0,668	5,706	0,000
ind7	0,458	0,118	0,611	3,894	0,000
ind8	0,204	0,171	0,170	1,187	0,242

Variabel Dependen: env_disc

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013

Dari kelima variabel independen serta kedua variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam model regresi, dua variabel diantaranya signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk inst_inv sebesar 0,078,

dan KOM_DIT sebesar 0,081. Pada variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan (tot_asset) sebesar 0,002 signifikan pada tingkat 0,1 sedangkan ukuran perusahaan (op_rev) sebesar 0,548 tidak signifikan karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,1, profitabilitas (ROA) sebesar 0,451 tidak signifikan karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,1. Jenis industri yaitu id 1, id 2, id 3, id 4, id 5, id 6, dan id 7 semuanya signifikan pada 0,1, sedangkan id 8 tidak signifikan karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,1.

Pengujian terhadap pengaruh variabel tersebut diperoleh sebagai berikut:

1. Variabel dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan

Pengujian hipotesis 1 mengenai pengaruh variabel dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan nilai t sebesar -1,436 dengan signifikansi sebesar 0,158. Hasil tersebut berarti bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis satu (H1).

2. Variabel kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan

Pengujian hipotesis 2 mengenai pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan nilai t sebesar -1,804 dengan signifikansi sebesar 0,078. Hasil tersebut berarti bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis dua (H2).

3. Variabel ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan

Pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh variabel ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan nilai t sebesar -0,040 dengan signifikansi sebesar 0,968. Hasil tersebut berarti bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis tiga (H3).

4. Variabel proporsi direksi wanita terhadap pengungkapan lingkungan

Pengujian hipotesis 4 mengenai pengaruh variabel proporsi direksi wanita terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan nilai t sebesar 1,083 dengan signifikansi sebesar 0,285. Hasil tersebut berarti bahwa variabel proporsi direksi wanita tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis empat (H4).

5. Variabel ukuran komite audit terhadap pengungkapan lingkungan

Pengujian hipotesis 5 mengenai pengaruh variabel ukuran komite audit terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan nilai t sebesar 1,786 dengan signifikansi sebesar 0,081. Hasil tersebut berarti bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis lima (H5).

6. Variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan

Pengujian pengaruh variabel kontrol ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan nilai t sebesar 3,304 dengan signifikansi sebesar 0,002. Hasil tersebut berarti bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

Pengujian pengaruh variabel kontrol ukuran perusahaan yang diukur dengan pendapatan operasi terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan nilai t sebesar 0,606 dengan signifikansi sebesar 0,548. Hasil tersebut berarti bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

7. Variabel kontrol profitabilitas terhadap pengungkapan lingkungan

Pengujian pengaruh variabel kontrol ukuran perusahaan yang diukur dengan ROA terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan nilai t sebesar 0,761 dengan signifikansi sebesar 0,451. Hasil tersebut berarti bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

8. Variabel kontrol jenis industri terhadap pengungkapan lingkungan

Pengujian pengaruh variabel kontrol jenis industri yang diukur dengan variabel dummy terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan industri agrikultur (id 1) memiliki nilai t sebesar 4,471 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut berarti bahwa industri agrikultur (id 1) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

Pengujian pengaruh variabel kontrol jenis industri yang diukur dengan variabel dummy terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan industri pertambangan (id 2) memiliki nilai t sebesar 7,077 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut berarti bahwa industri pertambangan (id 2) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

Pengujian pengaruh variabel kontrol jenis industri yang diukur dengan variabel dummy terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan industri dasar dan kimia (id 3) memiliki nilai t sebesar 7,486 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut berarti bahwa industri dasar dan kimia (id 3) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

Pengujian pengaruh variabel kontrol jenis industri yang diukur dengan variabel dummy terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan aneka industri (id 4) memiliki nilai t sebesar 2,246 dengan signifikansi sebesar 0,030. Hasil tersebut berarti bahwa aneka industri (id 4) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

Pengujian pengaruh variabel kontrol jenis industri yang diukur dengan variabel dummy terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan industri barang konsumen (id 5) memiliki nilai t sebesar 3,606 dengan signifikansi sebesar 0,001. Hasil tersebut berarti bahwa industri barang konsumen (id 5) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

Pengujian pengaruh variabel kontrol jenis industri yang diukur dengan variabel dummy terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan industri properti, real estate dan konstruksi bangunan (id 6) memiliki nilai t sebesar

5,706 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut berarti bahwa industri properti, real estate dan konstruksi bangunan (id 6) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

Pengujian pengaruh variabel kontrol jenis industri yang diukur dengan variabel dummy terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan industri infrastruktur, peralatan dan transportasi (id 7) memiliki nilai t sebesar 3,894 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut berarti bahwa industri infrastruktur, peralatan dan transportasi (id 7) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

Pengujian pengaruh variabel kontrol jenis industri yang diukur dengan variabel dummy terhadap pengungkapan lingkungan menunjukkan industri keuangan (id 8) memiliki nilai t sebesar 1,187 dengan signifikansi sebesar 0,242. Hasil tersebut berarti bahwa industri keuangan (id 8) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada $\alpha=10\%$.

Tabel 4.10
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Keterangan
1.	Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.	Tidak signifikan, hipotesis ditolak
2.	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan.	Signifikan negatif, hipotesis diterima
3.	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.	Tidak signifikan, hipotesis ditolak
4.	Proporsi direktur wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.	Tidak signifikan, hipotesis ditolak
5.	Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.	Signifikan, hipotesis diterima

4.3 Pembahasan Hipotesis

Pada sub-bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Penjelasan secara terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 Hipotesis 1

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan hasil pengolahan data **hipotesis satu (H1) ditolak**. Variabel dewan komisaris independen (IND) diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen. Hasil uji regresi linear diatas menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki nilai beta sebesar -0,633 dan signifikansi sebesar 0,158. Variabel dewan komisaris independen memiliki signifikansi lebih dari 0,1 yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara dewan komisaris independen dan pengungkapan lingkungan. Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.2 diketahui bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki dewan komisaris independen sebesar 43% tetapi pada sampel penelitian ini hanya terdapat 20 data sampel yang memiliki dewan komisaris independen di atas nilai rata-rata tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian ini dapat diterima mengingat masih lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia (Mintara, 2008).

Alasan untuk mendukung penelitian ini menurut Terzhagi (2012) menyatakan bahwa kemungkinan dewan komisaris independen masih memiliki kompetensi yang lemah. Secara umum pada masing – masing perusahaan dapat dikatakan bahwa penambahan anggota dewan komisaris independen hanya sekedar untuk formalitas memenuhi persyaratan jumlah minimal keberadaan dewan komisaris independen dari peraturan Bapepam. Meskipun hanya sekedar formalitas belaka, tetapi akan lebih baik jika tiap anggota dewan komisaris independen mempunyai kompetensi dan integritas yang mencukupi pada bidangnya serta minimal salah seorang anggota harus memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat seperti dalam melakukan pengungkapan sosial berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan pedoman KNKG. Oleh karena itu, berapapun banyaknya dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya pengungkapan lingkungan.

4.3.2 Hipotesis 2

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan hasil pengolahan data **hipotesis dua (H2) diterima**. Variabel kepemilikan institusional (inst_inv) diukur dengan menggunakan jumlah presentase institusional investor. Hasil uji regresi linear diatas menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai beta sebesar -0,011 dan signifikansi sebesar 0,078. Variabel kepemilikan institusional memiliki signifikansi kurang dari 0,1 yang artinya

terdapat hubungan signifikan negatif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan lingkungan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar presentase kepemilikan institusional, maka semakin sedikit pula pengungkapan mengenai lingkungan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lakhal (2005), Habib dan Jiang (2009) serta Shan (2009) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan. Memiliki mayoritas investor institusional dapat mengurangi efektivitas dewan. Investor besar lebih cenderung mendominasi dan mempengaruhi keputusan manajemen (Lau et al., 2009) karena mereka memegang saham dalam jumlah besar dalam perusahaan. Hal ini menyebabkan kurangnya aktivitas perusahaan serta kurangnya direksi independen (Bergolf dan Pajuste, 2005) dan kadang-kadang bahkan mungkin membatasi atau membatasi keputusan manajer (Lakhal, 2005).

Sebagian besar studi telah menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan perusahaan (Habib dan Jiang, 2009; Shan, 2009; Lakhal, 2005). Pemegang saham yang kuat sering memiliki lebih banyak pengaruh pada keputusan manajemen dan maka organisasi itu sendiri menjadi kurang independen di bawah kepemilikan sangat terkonsentrasi.

4.3.3 Hipotesis 3

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan hasil pengolahan data **hipotesis tiga (H3) ditolak**. Variabel ukuran dewan komisaris (tot_kom) diukur dengan menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. Hasil uji regresi linear diatas menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki nilai beta sebesar -0,001 dan signifikansi sebesar 0,968. Variabel ukuran dewan komisaris memiliki signifikansi lebih dari 0,1 yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan lingkungan. Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.2 diketahui bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki dewan komisaris sebanyak 6 tetapi pada sampel penelitian ini hanya terdapat 22 data sampel yang memiliki dewan komisaris di atas nilai rata-rata tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maria Wijaya (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Alasan yang memungkinkan hipotesis 3 ini ditolak adalah karena dewan komisaris merupakan *shareholder* yang berfungsi untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Fahrizqi,2010), maka dewan komisaris akan membuat kebijakan menggunakan laba perusahaan untuk aktivitas operasional yang lebih menguntungkan daripada untuk melakukan aktivitas sosial. Kalau perusahaan tidak melakukan aktivitas

sosial, otomatis perusahaan tidak akan mengungkapkan tanggung jawab sosial apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, berapapun banyaknya dewan komisaris yang dimiliki perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya pengungkapan lingkungan .

4.3.4 Hipotesis 4

Hipotesis empat (H4) menyatakan bahwa proporsi direksi wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan hasil pengolahan data **hipotesis empat (H4) ditolak**. Variabel proporsi direksi wanita (p_femdir) diukur dengan menggunakan jumlah proporsi direksi wanita dalam. Hasil uji regresi linear diatas menunjukkan bahwa proporsi direksi wanita memiliki nilai beta sebesar 0,165 dan signifikansi sebesar 0,838. Variabel proporsi direksi wanita memiliki signifikansi lebih dari 0,1 yang artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara proporsi direksi wanita dan pengungkapan lingkungan. Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.2 diketahui bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki proporsi direksi wanita sebanyak 0,0374 tetapi pada sampel penelitian ini hanya terdapat 11 data sampel yang memiliki proporsi direksi wanita di atas nilai rata-rata tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa proporsi direksi wanita tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudana dan Arlindania (2011) yang menyatakan bahwa proporsi direksi wanita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Alasan yang memungkinkan hipotesis 4 ini ditolak adalah kemungkinan dapat disebabkan oleh faktor budaya

di Indonesia sebagai tujuan sampel penelitian. Faktor budaya yang dimaksud adalah dimana wanita yang memiliki sikap mudah mengalah untuk menghargai pria. Hasil analisis data pada perusahaan sampel juga menunjukkan bahwa hanya beberapa wanita yang menduduki posisi penting dalam perusahaan, sehingga wanita kurang memiliki peranan yang menentukan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, berapapun banyaknya direksi wanita yang dimiliki perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya pengungkapan lingkungan karena perusahaan tetap harus membuat laporan mengenai pengungkapan lingkungan.

4.3.5 Hipotesis 5

Hipotesis lima (H5) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan hasil pengolahan data **hipotesis lima (H5) diterima**. Variabel ukuran komite audit (kom_dit) diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit. Hasil uji regresi linear diatas menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki nilai beta sebesar 0,046 dan signifikansi sebesar 0,010. Variabel ukuran komite audit memiliki signifikansi kurang dari 0,1 yang artinya terdapat hubungan signifikan positif antara ukuran komite audit dan pengungkapan lingkungan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka semakin banyak pengungkapan mengenai lingkungan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handajani,dkk (2008) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap

pengungkapan lingkungan. Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik pengungkapan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, dengan ukuran komite audit yang semakin besar maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

4.3.6 Variabel Kontrol

Terdapat tiga variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan total asset dan pendapatan operasi, profitabilitas yang diukur dengan ROA serta jenis industri yang diukur dengan variabel dummy. Dari hasil uji regresi, variabel kontrol ukuran perusahaan ini berdasarkan total aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan berdasarkan pendapatan operasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Variabel kontrol profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Variabel kontrol jenis industri yaitu id 1, id 2, id 3, id 4, id 5, id 6, dan id 7 semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan id 8 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

Variabel total aset mewakili ukuran suatu perusahaan. Dari hasil uji regresi linear pada total aset didapatkan nilai beta yang positif dan signifikan. Nilai beta menunjukkan angka 0,037 dengan nilai signifikansi 0,002. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2005), hal ini bisa terjadi karena bahwa perusahaan besar melakukan aktivitas yang banyak pula sehingga memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan, sehingga banyak *shareholder* dan *stakeholder* yang peduli terhadap program lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan.

Variabel pendapatan operasi mewakili ukuran suatu perusahaan. Dari hasil uji regresi linear pada total aset didapatkan nilai beta yang negatif dan tidak signifikan. Nilai beta menunjukkan angka $0,429 \times 10^{-15}$ dengan nilai signifikansi 0,548. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan pendapatan operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kathyayini et al (2012), hal ini karena rata – rata sampel perusahaan yang digunakan memiliki pendapatan operasi yang besar. Jadi,berapapun pendapatan operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan karena masing-masing perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat pengungkapan lingkungan.

Variabel ROA mewakili tingkat profitabilitas perusahaan. Dari hasil analisis regresi linear didapatkan nilai beta yang positif dan signifikan. Nilai beta menunjukkan angka 0,305 dengan nilai signifikansi 0,451. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dirasa tidak perlu

melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang kesuksesan kinerja keuangan perusahaan dan sebaliknya pada saat tingkat profitabilitas rendah perusahaan perlu mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk menunjukkan kinerja yang baik atau *good news* misalnya dalam lingkup sosial, sehingga investor akan tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Variabel kontrol jenis industri diukur menggunakan variabel dummy. Hasil Regresi menunjukkan bahwa jenis industri memainkan beberapa bagian dalam menjelaskan pengungkapan lingkungan: id 1 (agri), id 2 (mining), id 3 (bas_ind), id 4 (aneka_ind), id 5 (cons_ind) , id 6 (properti_ind), dan id 7 (infrastruktur_ind) semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan id 8 (finance_ind) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

Dengan demikian, model menunjukkan berada di salah satu industri ini menaikkan proporsi pelaporan lingkungan dalam laporan tahunan dibandingkan industri lainnya. Hasil ini bukanlah tak terduga dan dapat dijelaskan oleh fakta bahwa industri yang memiliki pengaruh signifikan merupakan industri sensitif sangat ramah lingkungan dan oleh karena itu lebih dicermati oleh regulator dan masyarakat umum. Oleh karena itu perusahaan dalam industri ini cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang lingkungan. Hasil ini konsisten dengan sebagian besar literatur sebelumnya (Cho dan Patten, 2007; Deegan dan Gordon, 1996; deVilliers et al., 2009; Halme dan Huse, 1997).

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai keterbatasan dari penelitian ini dan saran bagi penelitian berikutnya. Penjelasan mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran diuraikan secara rinci sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai hubungan struktur *corporate governance* dengan pengungkapan lingkungan pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam NCSR. Pengukuran struktur *corporate governance* menggunakan lima proksi yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi direktur wanita dan ukuran komite audit. Selain itu juga terdapat tiga variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan jenis industri. Penelitian dilakukan terhadap 60 sampel yang didapatkan berdasarkan hasil dari pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa model yang digunakan sudah tepat untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang semuanya signifikan, yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas dalam model mempengaruhi pengungkapan lingkungan. Selain itu uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang cukup untuk menerangkan variasi variabel dependen.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dari hipotesis yang telah dirumuskan dan telah diuji, maka dapat disimpulkan pengaruh variabel-variabel independen struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan lingkungan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu (H1) dibuktikan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Dengan demikian, **hipotesis satu (H1) ditolak**. Hasil ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki proporsi dewan komisaris independen besar maupun kecil maka belum tentu untuk melakukan pengungkapan lingkungan.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dua (H2) dibuktikan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan lingkungan. Dengan demikian, **hipotesis dua (H2) diterima**. Hasil ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional besar maka terdapat kemungkinan yang kecil untuk melakukan pengungkapan lingkungan.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tiga (H3) dibuktikan bahwa variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Dengan demikian, **hipotesis tiga (H3) ditolak**. Hasil ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris besar atau kecil maka belum tentu untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis empat (H4) dibuktikan bahwa variabel proporsi direktur wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Dengan demikian, **hipotesis empat (H4) ditolak**. Hasil ini berarti bahwa perusahaan dengan proporsi direksi wanita yang besar belum tentu memiliki pengaruh bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan.
5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis lima (H5) dibuktikan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan lingkungan. Dengan demikian, **hipotesis lima (H5) diterima**. Hasil ini berarti bahwa perusahaan dengan ukuran komite audit besar maka terdapat kemungkinan yang tinggi untuk melakukan sebuah pengungkapan lingkungan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel kontrol dalam penelitian yaitu ukuran perusahaan dengan ukuran total aset memiliki pengaruh signifikan positif dan pendapatan operasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Variabel kontrol kedua yaitu ROA yang mengukur profitabilitas perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Sedangkan variabel kontrol terakhir yaitu jenis industri dengan menggunakan variabel dummy menunjukkan bahwa id 1 (agri), id 2 (mining), id 3 (bas_ind), id 4 (aneka_ind), id 5 (cons_ind) , id 6 (properti_ind), dan id 7 (infrastruktur_ind) semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan id 8 (finance_ind) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan maupun kelemahan antara lain:

1. Jumlah perusahaan sampel di Indonesia yang mengeluarkan *sustainability report* secara lengkap dan tergabung dalam NCSR (*National Centre Sustainability Reporting*) masih sangat sedikit, sehingga membatasi jumlah sampel penelitian.
2. Penelitian ini hanya mengidentifikasi 5 faktor struktur *corporate governance* sebagai variabel independen yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan dan *sustainability reporting* karena keterbatasan waktu penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran dari peneliti yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait antara lain:

1. Bagi perusahaan, sebaiknya lebih mengawasi dan meningkatkan kinerja struktur *corporate governance*-nya agar manajer perusahaan dapat menentukan kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial yang tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Bagi pemerintah, sebaiknya dapat membuat peraturan yang lebih jelas mengenai format pengungkapan lingkungan untuk perusahaan – perusahaan yang jenis usahanya mempunyai pengaruh bagi lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan lingkungan serta memperpanjang periode penelitian sehingga dapat meningkatkan jumlah sampel dan sampel dapat mencakup semua industri.



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. dan Zutshi, A. 2004. *Corporate social responsibility: why business should act responsibly and be accountable*. Australian Accounting Review, Vol. 14, pp. 31-40.
- Adams, R., Almeida, H. dan Ferreira, D. 2005. *Powerful CEOs and their impact on corporate performance*. Review of Financial Studies, Vol. 18, pp. 1403-32.
- Adams, R.B. dan Ferreira, D. 2004. *Gender diversity in the boardroom*. ECGI Working Paper Series in Finance, No. 58, European Corporate Governance Institute (ECGI), Brussels.
- Ariningtika, Pradesta. 2013. *Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)*. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, Halaman 1-11.
- Bergolf, E. dan Pajuste, A. 2005. *What do firms disclose and why? Enforcing corporate governance and transparency in Central and Eastern Europe*. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 21, pp. 178-97.
- Chen, C.J. dan Jaggi, B. 2000. *Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosure in Hong Kong*. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 9, pp. 285-310.
- CPA Australia. 2002. *Environmental reporting*. CPA, Vol. 72, pp. 52-4.
- Deegan, C. 2002. *The legitimising effect of social and environmental disclosures – a theoretical foundation*. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15, pp. 282-312.
- de Villiers, C. dan van Staden, C. 2009. *Good, bad and crisis: how much and where they disclose environmental information*. Paper presented at the AFAANZ Conference, Adelaide.
- de Villiers, C., Naiker, V. dan van Staden, C. 2009. *Good corporate governance makes for good environmental performance*. Paper presented at the AFAANZ Conference, Adelaide.
- Donnelly, R. dan Mulcahy, M. 2008. *Board structure, ownership, and voluntary disclosure in Ireland*. Corporate Governance, Vol. 16, pp. 416-29.
- Effendi, Bahtiar, Uzliawati, Lia dan Yulianto, Agus Sholikhan. 2011. *Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Environmental Disclosure pada Perusahaan*

- Manufaktur yang Listing di Bei Tahun 2008- 2011. Jurnal FE Universitas Sultan Ageng Tirtayasa- Serang.*
- Elkington, J. 1998. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Businesses*. Oxford: Capstone.
- Eng, L. dan Mak, Y.T. 2003. *Corporate governance and voluntary disclosure*. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 22, pp. 325-45.
- Ernest dan Young. 2002. *Corporate Social Responsibility – A Survey of Global Companies*. Sydney: Ernst & Young.
- Forum Corporate Governance Indonesia. 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta.
- Ghozali, Imam dan Chariri, Anis. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Gibson, K. dan O'Donovan, G. 2007. *Corporate governance and environmental reporting: an Australian study*. Corporate Governance, Vol. 15, pp. 944-56.
- Global Reporting Initiatives (GRI). 2006. Sustainability Reporting Guidelines. www.globalreporting.org/guidelines/062006guidelines.asp. Diakses tanggal 17 November 2013.
- Gul,A dan Leung. 2004. *Board leadership, outside directors expertise and voluntary corporate disclosures*. Journal of Accounting and Public Policy No. 23, p. 351–379.
- Habib, A. dan Jiang, H. 2009. *The impact of ownership concentration on voluntary disclosure practices in New Zealand*. Paper presented at the AFAANZ Conference, Adelaide.
- Hamilton, K. 2004. *The need for effective communication with market stakeholders*. Australian Accounting Review, Vol. 14, pp. 3-9.
- Handajani, Lilik., dkk. 2010. *The Effect of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism to Corporate Social Responsibility Disclosure: Study at Public Companies in Indonesia Stock Exchange*. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XII, Purwekerto.
- Haniffa, R. and Cooke, T. (2005). *The Impact of Culture, and Governance on Corporate Social Reporting*. Journal of Accounting and Public Policy 24, 391-430.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002., *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jamali, D., Safieddine, M.A. dan Rabbath, M. 2008. *Corporate governance and corporate social research synergies and interrelationships*. Corporate Governance: An International Review, Vol. 16, p. 443.
- Januarti, Indira dan Apriyanti, Dini. 2005. *Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan*. Jurnal Maksi Universitas Diponegoro Vol. 5 No. 2 Agustus 2005 hal 227-242.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. 1976. *Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure*. Journal of Financial Economics, Vol. 3 No. 4, pp. 305-65.
- Kariyoto. 2011. *Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Teoritis*. Jurnal STIE Asia Malang.
- Kathyayini, et al. 2012. *Corporate Social and Environmental Reporting: an Australian Study*. Emerald Group Publishing Limited Vol. 12 No. 2 hal 143-163.
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Laidroo. 2009. *Association between ownership structure and public announcements' disclosures*. Corporate Governance: An International Review, Vol. 71, pp. 13-34.
- Lakhal, F. 2005. *Voluntary earnings disclosures and corporate governance: evidence from France*. Review of Accounting & Finance, Vol. 4, pp. 64-86.
- Muhammad Muslim Utomo. 2000. *Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi III IAIKAPd.
- O'Donovan, G. 2002a. *Triple bottom line solution*. Australian CPA, Vol. 72, pp. 14-16.
- O'Donovan, G. 2002b. *Environmental disclosures in the annual report: extending the applicability and predictive power of legitimacy theory*. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15 No. 3, pp. 344-371.
- Organization for Economic Co-operation and Development. 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*. Perancis: OECD.
- Said, Roshima., Yuserrie Hj Zainuddin, dan Hasnah Haron. 2009. *The Relationship between Corporate Governance Characteristics in Malaysian*

- Public Listed Companies*. Social Responsibility Journal. Vol.5, No.2, hal. 212-226.
- Sari, Mega Putri Yustia. 2013. *Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report*. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2, No. 3, Tahun 2013, Halaman 1-10.
- Sembiring, E.R. 2005. *Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial: study empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta*. SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005.
- Shinta, Nendy Pramita dan Ahmar, Nurmala. 2011. *Eksplorasi Struktur Kepemilikan Saham Publik Di Indonesia Tahun 2004 – 2008*. *The Indonesian Accounting Review* Vol. 1, No. 2, July 2011, pages 145 – 154.
- Suaryana, Agung. 2011. *Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Vol. 6, No. 1 Januari 2011.
- Sudana dan Arlindania. 2011. *Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan Go-Public di BEI*. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun 4 No.1 April 2011.
- Suhardjanto, Djoko. 2010. *Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Environmental Disclosure*. Prestasi Vol. 6, No. 1 - Juni 2010.
- Suhardjanto, Djoko dan Miranti, Laras. 2010. *Indonesian Environmental Reporting Index dan Karakteristik Perusahaan*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Terzaghi, Muhammad Titan. 2012. *Pengaruh Earning Management Dan Mekanisme CG Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI*. Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi Vol. 2 No. 1. Hlm 31-47.
- Uma, Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* Edisi 4, Buku 1 dan Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Unerman, J., Bebbington, J. dan O'Dwyer, B. 2007. *Sustainability Accounting and Accountability*. London: Routledge.

LAMPIRAN A

Pedoman GRI

Indikator Kinerja Lingkungan

Aspek: Material

EN 1 Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume

EN 2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang

Aspek: Energi

EN 3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer

EN 4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer

EN 5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi

EN 6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.

EN 7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai

Aspek: Air

EN 8 Total pengambilan air per sumber

EN 9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air

EN 10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang

Aspek: Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)

EN 11 Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi

EN 12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)

EN 13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat

EN 14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati

EN 15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi

Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah

EN 16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat

EN 17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat

EN 18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya

EN 19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat

EN 20 NO_x, SO_x dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat

EN 21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan

EN 22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan

EN 23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan

EN 24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional

EN 25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.

Aspek: Produk dan Jasa

EN 26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.

EN 27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.

Aspek: Kepatuhan

EN 28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.

Aspek: Pengangkutan/Transportasi

EN 29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.

Aspek: Menyeluruh

EN 30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.

LAMPIRAN B

Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel

Tahun	No	Nama Perusahaan	Kode
2012	1	PT Aneka Tambang Tbk.	ANTM
	2	PT Vale Indonesia Tbk.	INCO
	3	PT Bukit Asam Tbk.	PTBA
	4	PT Holcim Indonesia Tbk.	SMCB
	5	PT Astra Internasional Tbk.	ASII
	6	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	TLKM
	7	PT Wijaya Karya Tbk.	WIKA
	8	PT United Tractor Tbk.	UNTR
	9	PT Bank Negara Indonesia Tbk.	BBNI
	10	PT Bakrie Sumatra Plantation	UNSP
	11	PT Bumi Resources Tbk.	BUMI
	12	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	SMGR
	13	PT Jasa Marga Tbk.	JSMR
	14	PT Perusahaan Listrik Negara	
	15	PT Unilever Indonesia Tbk.	UNVR
2011	16	PT Aneka Tambang Tbk.	ANTM
	17	PT Vale Indonesia Tbk.	INCO

	18	PT Bukit Asam Tbk.	PTBA
	19	PT Holcim Indonesia Tbk.	SMCB
	20	PT Astra Internasional Tbk.	ASII
	21	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	TLKM
	22	PT Wijaya Karya Tbk.	WIKA
	23	PT United Tractor Tbk.	UNTR
	24	PT Bank Negara Indonesia Tbk.	BBNI
	25	PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk	UNSP
	26	PT Bumi Resources Tbk.	BUMI
	27	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	SMGR
	28	PT Jasa Marga Tbk.	JSMR
	29	PT Perusahaan Listrik Negara	
	30	PT Unilever Indonesia Tbk.	UNVR
2010	31	PT Aneka Tambang Tbk.	ANTM
	32	PT Vale Indonesia Tbk.	INCO
	33	PT Bukit Asam Tbk.	PTBA
	34	PT Holcim Indonesia Tbk.	SMCB
	35	PT Astra Internasional Tbk.	ASII
	36	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	TLKM
	37	PT Wijaya Karya Tbk.	WIKA

	38	PT United Tractor Tbk.	UNTR
	39	PT Bank Negara Indonesia Tbk.	BBNI
	40	PT Bakrie Sumatra Plantation	UNSP
	41	PT Bumi Resources Tbk.	BUMI
	42	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	SMGR
	43	PT Jasa Marga Tbk.	JSMR
	44	PT Perusahaan Listrik Negara	
	45	PT Unilever Indonesia Tbk.	UNVR
2009	46	PT Aneka Tambang Tbk.	ANTM
	47	PT Vale Indonesia Tbk.	INCO
	48	PT Bukit Asam Tbk.	PTBA
	49	PT Holcim Indonesia Tbk.	SMCB
	50	PT Astra Internasional Tbk.	ASII
	51	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	TLKM
	52	PT Wijaya Karya Tbk.	WIKA
	53	PT United Tractor Tbk.	UNTR
	54	PT Bank Negara Indonesia Tbk.	BBNI
	55	PT Bakrie Sumatra Plantation	UNSP
	56	PT Bumi Resources Tbk.	BUMI
	57	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	SMGR

	58	PT Jasa Marga Tbk.	JSMR
	59	PT Perusahaan Listrik Negara	
	60	PT Unilever Indonesia Tbk.	UNVR



TABULASI DATA

TAHUN	PERUSAHAAN	KODE	env_disc	IND	p_femdir	tot_kom	KOM_DIT	inst_inv	tot_asset (dlm ribuan)	Op_rev (dlm ribuan)	ROA	id1	id2	id3	id4	id5	id6	id7	id8
2009	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	1,000	0,400	0	5	5	5,16%	9939996438	8711370255	0,061	0	1	0	0	0	0	0	0
	PT Vale Indonesia Tbk	INCO	1,000	0,300	0	10	3	0,00%	19707460000	7305139200	0,084	0	1	0	0	0	0	0	0
	PT Bukit Asam Tbk	PTBA	0,467	0,400	0	5	3	8,63%	8078578000	8947854000	0,338	0	1	0	0	0	0	0	0
	PT Holcim Indonesia Tbk	SMCB	0,567	0,400	0	5	3	0,00%	7265366000	5943881000	0,123	0	0	1	0	0	0	0	0
	PT Astra Internasional Tbk	ASII	0,267	0,500	0	10	4	2,05%	88938000000	98526000000	0,113	0	0	0	1	0	0	0	0
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	TLKM	0,833	0,400	0	5	6	6,17%	97814160000	64597000000	0,117	0	0	0	0	0	0	1	0
	PT Wijaya Karya Tbk	WIKA	0,800	0,400	0	5	4	8,00%	5700613602	6590857284	0,033	0	0	0	0	0	1	0	0
	PT United Tractor Tbk	UNTR	0,233	0,375	0	8	3	0,00%	24404828000	29241883000	0,156	0	0	0	0	0	0	0	0
	PT Bank Negara Indonesia Tbk	BBNI	0,233	0,571	0,111	7	5	32,61%	227496967000	11132768000	0,011	0	0	0	0	0	0	0	1
	PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk	UNSP	0,667	0,500	0	4	3	3,01%	5071797313	2325282030	0,050	1	0	0	0	0	0	0	0
	PT Bumi Resources Tbk	BUMI	1,000	0,250	0	8	4	1,51%	71111888513	35440773329	0,026	0	1	0	0	0	0	0	0
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	1,000	0,500	0	6	5	2,49%	12951308161	14387849799	0,257	0	0	1	0	0	0	0	0
	PT Jasa Marga Tbk	JSMR	0,200	0,333	0	6	3	11,28%	14918018368	3692000323	0,067	0	0	0	0	0	0	1	0
	PT Perusahaan Listrik Negara		0,933	0,286	0	6	3	0,00%	333713076000	145222144000	0,031	0	0	0	0	0	0	0	0
	PT Unilever Tbk	UNVR	0,833	0,750	0,25	7	7	0,00%	7484990000	18246872000	0,407	0	0	0	0	1	0	0	0
2010	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	1,000	0,500	0	4	6	6,00%	12218889770	8744300219	0,138	0	1	0	0	0	0	0	0
	PT Vale Indonesia Tbk	INCO	1,000	0,300	0	10	3	0,00%	21026256000	12342043410	0,200	0	1	0	0	0	0	0	0
	PT Bukit Asam Tbk	PTBA	1,000	0,400	0	5	3	6,99%	8718394000	7909154000	0,229	0	1	0	0	0	0	0	0
	PT Holcim Indonesia Tbk	SMCB	0,567	0,500	0	6	3	0,00%	10437249000	5960589000	0,080	0	0	1	0	0	0	0	0
	PT Astra Internasional Tbk	ASII	0,733	0,364	0	11	3	2,78%	113362000000	129991000000	0,150	0	0	0	1	0	0	0	0
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	TLKM	1,000	0,400	0	5	6	0,00%	100501000000	68629181000	0,158	0	0	0	0	0	0	1	0
	PT Wijaya Karya Tbk	WIKA	0,800	0,400	0	5	3	7,37%	6286305000	6022922000	0,045	0	0	0	0	0	1	0	0

2011	PT United Tractor Tbk	UNTR	0,233	0,500	0	6	3	0,00%	29700914000	37323872000	0,130	0	0	0	0	0	0	0
	PT Bank Negara Indonesia Tbk	BBNI	0,300	0,571	0,100	7	4	8,37%	248580529000	11720717000	0,017	0	0	0	0	0	0	1
	PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk	UNSP	0,667	0,600	0	5	3	5,69%	18502257139	3004453565	0,044	1	0	0	0	0	0	0
	PT Bumi Resources Tbk	BUMI	1,000	0,375	0	8	4	0,00%	68043507215	42257134765	0,038	0	1	0	0	0	0	0
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	1,000	0,500	0	6	4	0,00%	15562999000	14344188706	0,235	0	0	1	0	0	0	0
	PT Jasa Marga Tbk	JSMR	0,200	0,333	0	6	3	4,67%	18952129000	4378584000	0,063	0	0	0	0	0	0	1
	PT Perusahaan Listrik Negara		0,933	0,286	0	7	3	0,00%	369560490000	162375294000	0,027	0	0	0	0	0	0	1
	PT Unilever Tbk	UNVR	0,933	0,750	0,375	4	3	0,00%	8701262000	19690239000	0,389	0	0	0	0	1	0	0
	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	1,000	0,333	0	6	7	0,00%	15201235077	10346433404	0,127	0	1	0	0	0	0	0
	PT Vale Indonesia Tbk	INCO	1,000	0,222	0	9	3	0,00%	23245075200	12015506850	0,138	0	1	0	0	0	0	0
	PT Bukit Asam Tbk	PTBA	1,000	0,333	0	6	3	8,40%	11510262000	10581570000	0,268	0	1	0	0	0	0	0
	PT Holcim Indonesia Tbk	SMCB	0,567	0,571	0	7	3	0,00%	10950501000	7523964000	0,097	0	0	1	0	0	0	0
	PT Astra Internasional Tbk	ASII	0,833	0,455	0,38	11	4	2,51%	154319000000	162564000000	0,137	0	0	0	1	0	0	0
	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	TLKM	0,333	0,400	0	5	7	3,94%	103054000000	71918000000	0,150	0	0	0	0	0	1	0
	PT Wijaya Karya Tbk	WIKA	0,967	0,400	0	5	3	8,55%	8322979571	7741827272	0,047	0	0	0	0	0	0	1
	PT United Tractor Tbk	UNTR	0,233	0,500	0	6	3	0,00%	46440062000	55052562000	0,127	0	0	0	0	0	0	0
	PT Bank Negara Indonesia Tbk	BBNI	0,267	0,571	0,100	7	4	9,57%	299058161000	13195814000	0,019	0	0	0	0	0	0	1
	PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk	UNSP	0,633	0,600	0	5	3	6,52%	18702295203	4367080851	0,031	1	0	0	0	0	0	0
	PT Bumi Resources Tbk	BUMI	1,000	0,375	0	8	4	0,00%	72189699886	38690235318	0,029	0	1	0	0	0	0	0
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	1,000	0,333	0	6	3	2,26%	19661602767	16378793758	0,201	0	0	1	0	0	0	0
2012	PT Jasa Marga Tbk	JSMR	0,200	0,333	0	6	3	6,33%	20915890567	4960473000	0,056	0	0	0	0	0	0	1
	PT Perusahaan Listrik Negara		0,933	0,286	0	7	7	0,00%	467782603000	208017823000	0,012	0	0	0	0	0	0	1
	PT Unilever Tbk	UNVR	1,000	0,800	0,40	5	3	0,00%	10482312000	23469218000	0,397	0	0	0	0	1	0	0
	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	1,000	0,333	0	6	6	6,68%	19708540946	10449885512	0,152	0	1	0	0	0	0	0
	PT Vale Indonesia Tbk	INCO	1,000	0,300	0	10	3	2,31%	22397568000	9354052090	0,029	0	1	0	0	0	0	0

PT Bukit Asam Tbk	PTBA	1,000	0,333	0	6	3	7,70%	12728981000	11594057000	0,229	0	1	0	0	0	0	0	0
PT Holcim Indonesia Tbk	SMCB	0,933	0,500	0	6	3	0,00%	12168517000	9011076000	0,111	0	0	1	0	0	0	0	0
PT Astra Internasional Tbk	ASII	0,833	0,417	0	12	4	3,45%	182274000000	188053000000	0,125	0	0	0	1	0	0	0	0
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	TLKM	0,933	0,400	0,130	5	7	4,41%	111369000000	77143000000	0,165	0	0	0	0	0	0	1	0
PT Wijaya Karya Tbk	WIKA	1,000	0,333	0	6	5	12,05%	10945209418	9816085895	0,046	0	0	0	0	0	1	0	0
PT United Tractor Tbk	UNTR	0,233	0,333	0	6	3	0,00%	50300633000	55953915000	0,114	0	0	0	0	0	0	0	0
PT Bank Negara Indonesia Tbk	BBNI	0,400	0,571	0,100	7	4	7,60%	333303506000	15458991000	0,021	0	0	0	0	0	0	0	1
PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk	UNSP	0,300	0,500	0	6	3	3,05%	18983332052	2485429887	-0,050	1	0	0	0	0	0	0	0
PT Bumi Resources Tbk	BUMI	1,000	0,308	0	13	3	0,00%	71116344092	36509260917	-0,096	0	1	0	0	0	0	0	0
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	SMGR	1,000	0,500	0	6	4	0,72%	26579084000	19598248000	0,185	0	0	1	0	0	0	0	0
PT Jasa Marga Tbk	JSMR	1,000	0,333	0	6	3	3,72%	24753551441	9070219074	0,062	0	0	0	0	0	0	1	0
PT Perusahaan Listrik Negara		0,933	0,286	0	7	4	0,00%	540705764000	232656456000	0,006	0	0	0	0	0	0	1	0
PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR	0,633	0,800	0,300	5	3	0,00%	11984979000	27303248000	0,404	0	0	0	0	1	0	0	0

Lampiran C

Output SPSS 20

Descriptives

[DataSet1] E:\skripsi raras\revisi sidang\fix\time series sample 60 man.sav

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
env_disc	60	,200	1,000	,74277	,302012
IND	60	,222	,800	,43175	,132871
inst_inv	60	0,0000%	32,6100%	3,705987%	5,1633222%
tot_kom	60	4	13	6,60	2,027
p_femdir	60	,00	,40	,0374	,09852
KOM_DIT	60	3	7	3,88	1,290
tot_asset	60	5071797313000	5407057640000	7859843196232	1205643252494
Op_rev	60	2325282030000	2326564560000	3927142621186	5532339218694
ROA	60	-,09595	,40700	,1192351	,11031272
ind1	60	0	1	,07	,252
ind2	60	0	1	,27	,446
ind3	60	0	1	,13	,343
ind4	60	0	1	,07	,252
ind5	60	0	1	,07	,252
ind6	60	0	1	,07	,252
ind7	60	0	1	,20	,403
ind8	60	0	1	,07	,252
Valid N (listwise)	60				

NPar Tests (Uji Normalitas)

[DataSet1] E:\skripsi raras\revisi sidang\fix\time series sample 60 man.sav

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,13394472
	Absolute	,118
Most Extreme Differences	Positive	,118
	Negative	-,105
Kolmogorov-Smirnov Z		,916
Asymp. Sig. (2-tailed)		,371

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Regression (Uji Heteroskedastisitas - Uji Glejser)

[DataSet1] E:\skripsi raras\revisi sidang\fix\time series sample 60 man.sav

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,559	,200		2,796	,008
IND	-,217	,219	-,297	-,992	,327
inst_inv	,004	,003	,188	1,157	,254
tot_kom	-,009	,011	-,189	-,811	,422
p_femdir	,077	,215	,079	,360	,720
cos_komdit	-,024	,020	-,167	-1,210	,233
ln_TA	-,011	,006	-,423	-1,986	,053
Op_rev	-4,437E-016	,000	-,249	-1,263	,213
ROA	-,131	,199	-,149	-,659	,513
ind1	-,056	,068	-,145	-,824	,414
ind2	-,016	,051	-,074	-,316	,754
ind3	,001	,055	,004	,021	,984
ind4	,073	,087	,188	,835	,408
ind5	,008	,127	,021	,063	,950
ind6	-,065	,070	-,167	-,926	,360
ind7	,095	,058	,395	1,631	,110
ind8	-,001	,085	-,002	-,008	,994

a. Dependent Variable: AbsUt

NPar Tests (Uji Autokorelasi)

[DataSet1] E:\skripsi raras\revisi sidang\fix\time series sample 60 man.sav

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00086
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	36
Z	1,302
Asymp. Sig. (2-tailed)	,193

a. Median

Regression

[DataSet2] E:\skripsi raras\revisi sidang\fix\print rev\time series sample 60.sav

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ind8, tot_kom, ind3, ind6, cos_komdit, p_femdir, ind1, Op_rev, ind7, ind4, inst_inv, ln_TA, ROA, ind2, IND, ind5 ^b		. Enter

a. Dependent Variable: env_disc

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,896 ^a	,803	,730	,156898

a. Predictors: (Constant), ind8, tot_kom, ind3, ind6, cos_komdit, p_femdir, ind1, Op_rev, ind7, ind4, inst_inv, ln_TA, ROA, ind2, IND, ind5

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,323	16	,270	10,976	,000 ^b
	Residual	1,059	43	,025		
	Total	5,381	59			

a. Dependent Variable: env_disc

b. Predictors: (Constant), ind8, tot_kom, ind3, ind6, cos_komdit, p_femdir, ind1, Op_rev, ind7, ind4, inst_inv, ln_TA, ROA, ind2, IND, ind5

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,649	,403		-1,611	,115
IND	-,633	,441	-,279	-1,436	,158
inst_inv	-,011	,006	-,190	-1,804	,078
tot_kom	-,001	,023	-,006	-,040	,968
p_femdir	,470	,434	,153	1,083	,285
cos_komdit	,071	,040	,160	1,786	,081
ln_TA	,037	,011	,456	3,304	,002
Op_rev	4,290E-016	,000	,078	,606	,548
ROA	,305	,401	,111	,761	,451
ind1	,615	,137	,512	4,471	,000
ind2	,732	,103	1,080	7,077	,000
ind3	,823	,110	,934	7,486	,000
ind4	,394	,175	,328	2,246	,030
ind5	,926	,257	,771	3,606	,001
ind6	,802	,141	,668	5,706	,000
ind7	,458	,118	,611	3,894	,000
ind8	,204	,171	,170	1,187	,242

Coefficients^a

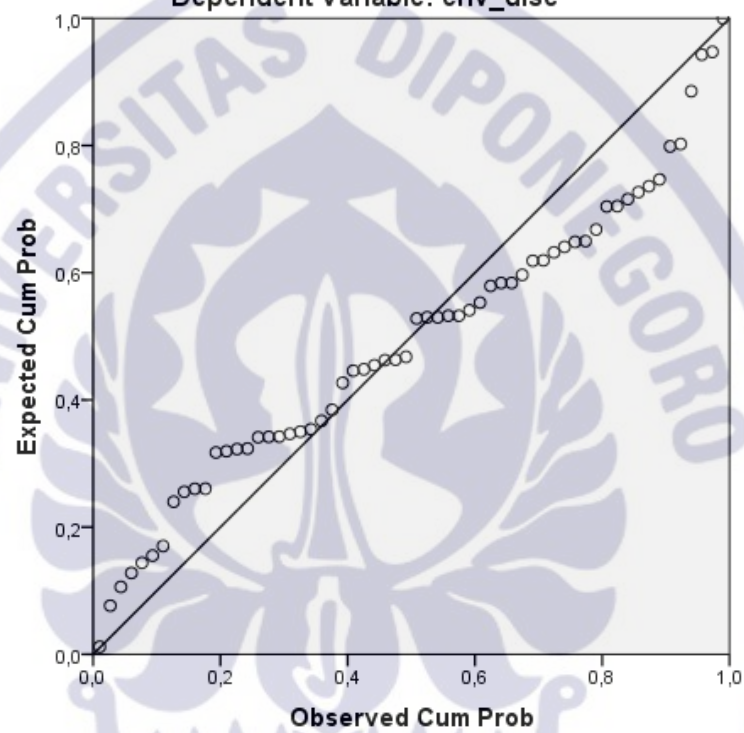
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
IND	,122	8,221
inst_inv	,413	2,419
tot_kom	,200	5,001
p_femdir	,229	4,373
cos_komdit	,567	1,763
ln_TA	,240	4,173
Op_rev	,280	3,578
ROA	,214	4,682
ind1	,349	2,866
ind2	,196	5,095
ind3	,294	3,401
ind4	,215	4,656
ind5	,100	9,992
ind6	,334	2,997
ind7	,186	5,387
ind8	,224	4,456

a. Dependent Variable: env_disc

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: env_disc



Scatterplot

Dependent Variable: env_disc

